

MANAJEMEN KURIKULUM

Rusi Rusmiati Aliyyah
Adelia Wulandari
Silvi Ayu Cahyani



MANAJEMEN KURIKULUM

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 1. prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 2. memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 3. Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 4. dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

MANAJEMEN KURIKULUM

Rusi Rusmiati Aliyyah
Adelia Wulandari
Silvi Ayu Cahyani



MANAJEMEN KURIKULUM

© Rusi Rusmiati Aliyyah, dkk.

viii + 114 halaman; 15.5 x 23 cm.

ISBN: 978-623-261-192-4

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Maret 2021

Penulis	: Rusi Rusmiati Aliyyah Adelia Wulandari Silvi Ayu Cahyani
Editor	: Alviava C.
Sampul	: M. Hakim
Layout	: Fendi

Diterbitkan oleh:

Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: admin@samudrabiru.co.id

Website: www.samudrabiru.co.id

WA/Call: 0812-2607-5872

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan penulisan buku Manajemen Kurikulum. Buku ini tersusun atas kerjasama yang baik dan bantuan dari pihak-pihak tertentu yang senantiasa membantu penulis. Buku ini dibuat semata-mata hanya untuk memberikan wawasan tambahan kepada para pembaca tentang Manajemen Kurikulum. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan buku ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan buku ini, sehingga kritik atau saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulisan buku selanjutnya.

Selanjutnya, penulis berharap semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bogor, 09 Februari 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENGERTIAN MANAJEMEN KURIKULUM	1
A. Pengertian Manajemen	1
B. Pengertian Kurikulum.....	2
C. Pengertian Manajemen Kurikulum	4
D. Manajemen Kurikulum (KTSP).....	5
BAB II	
PERAN DAN FUNGSI KURIKULUM	9
A. Peran Kurikulum	9
B. Fungsi Kurikulum	11
C. Fungsi Manajemen Kurikulum.....	14
BAB III	
LANDASAN KURIKULUM	17
A. Landasan Manajemen Kurikulum	17
B. Landasan Filosofis.....	18
C. Landasan Psikologis	20
D. Landasan Sosiologi	22
E. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	25
BAB IV	
MODEL-MODEL KURIKULUM	27
A. Model Kurikulum	27
B. Model-Model Pengembangan Kurikulum	30
C. Model Kurikulum Berbasis Kompetensi.....	36

BAB V	
ORGANISASI KURIKULUM	67
A. Pengertian Organisasi Kurikulum	67
B. Dimensi organisasi kurikulum.....	69
C. Prosedur Pengorganisasian Kurikulum	73
D. Jenis-jenis Organisasi Kurikulum	73
E. Karakteristik Pengorganisasian Kurikulum	83
BAB VI	
DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM	85
A. Pengertian Pengembangan Kurikulum	85
B. Pendekatan Pengembangan Kurikulum	86
C. Komponen-komponen Pengembangan Kurikulum	90
D. Hakikat Desain Kurikulum	92
E. Desain Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter.....	92
DAFTAR PUSTAKA	97
GLOSARIUM.....	101
INDEKS	107
BIOGRAFI PENULIS.....	111

BAB I

PENGERTIAN MANAJEMEN KURIKULUM

A. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Sumber daya organisasi yang dimaksud adalah aset yang dimiliki oleh organisasi, baik manusianya dan keterampilan, *know-how*, serta pengalaman mereka, maupun mesin, bahan mentah, teknologi, citra organisasi, paten, modal finansial, serta loyalitas pegawai dan pelanggan. Manajemen juga merupakan pengambilan keputusan (*management is decision making*) (Suprihanto, 2014, hal. 4). Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi dan sebagainya (Siswanto, 2007, hal. 2).

Definisi menurut para ahli dapat disimpulkan sebagai seni ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai suatu ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan (*approach*) terhadap seluruh dunia empiris, yaitu yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang pada prinsipnya dapat diamati oleh indera manusia (Hamali, 2019, hal. 31).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa mana-

jemen adalah suatu proses atau pencapaian sasaran dengan upaya perencanaan, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif dan efisien.

B. Pengertian Kurikulum

Secara etimologis, istilah kurikulum (*curriculum*) berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya “pelari” dan *curere* yang berarti “tempat berpacu”. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada Zaman Romawi Kuno di Yunani. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata *courier* yang berarti “berlari”. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari *start* sampai *finish* untuk memperoleh medali/penghargaan (Arifin, 2011).

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh banyak ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum dapat ditinjau dari dua sisi yang berbeda, yakni menurut pandangan lama dan pandangan baru. Pandangan lama atau sering disebut pandangan tradisional, merumuskan bahwa kurikulum adalah *sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh murid untuk memperoleh ijazah*. Pengertian itu mempunyai implikasi, yaitu kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran sendiri pada hakikatnya adalah pengalaman nenek moyang di masa lampau. Berbagai pengalaman tersebut dipilih, dianalisis, serta disusun secara sistematis dan logis, sehingga muncul mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi, ilmu hayat, dan sebagainya. Sebagai perbandingannya, ada pula pandangan baru atau modern, yaitu implikasinya adalah tafsiran tentang kurikulum bersifat luas, karena kurikulum bukan hanya terdiri atas mata pelajaran (*courses*), tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab (Hamalik, 2007, hal. 3-4).

Kurikulum merupakan rancangan dan pelaksanaan pendidikan atau pengajaran sebenarnya karena memang kurikulum merupakan dokumen yang berisi tentang hal tersebut. Rancangan merupakan satu tahapan sebelum pelaksanaan, melaluinya diharapkan pengajaran dapat lebih efektif dan efisien (Sukmadinata, Nana Syaodih, 2001, hal. 38). Menyatakan bahwa kurikulum sebagai rancangan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan. Berdasarkan

hal tersebut, kurikulum membutuhkan landasan yang kuat dalam perancangannya. Kajian-kajian filosofis, psikologis, sosial, budaya, perkembangan ilmu dan teknologi sangat diperlukan sebagai fondasi kurikulum. Pengertian kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu pengertian tradisional dan pengertian modern. Pengertian tradisional kurikulum adalah sejumlah pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk kenaikan kelas atau ijazah. Pengertian modern kurikulum adalah suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu (Soetopo, 2009, hal. 3).

Kata “kurikulum” bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa latin yang kata dasar adalah “*currere*”. Kurikulum adalah seperangkat rancangan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada harapan dewasa ini bahwa kurikulum di buat memiliki tingkat daya saing, pengetahuan yang mendasar dan luas (*broad based education*) (Suranto, 2009). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2009). Kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup dan urusan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum disusun atau dirancang sedemikian rupa adalah untuk memperlancar proses belajar mengajar dalam bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan bersama-sama dengan tenaga kependidikan. Akan tetapi banyak para ahli kurikulum yang tidak puas dengan pengertian yang terbatas pada kegiatan sekolah yang direncanakan saja, melainkan semua peristiwa yang terjadi dalam pengawasan sekolah, sehingga kurikulum merupakan keseluruhan dari berbagai kegiatan sekolah, mulai dari kegiatan seperti kepramukaan, pertunjukan kesenian dan kegiatan lainnya yang dilakukan peserta didik di dalam dan di luar sekolah, asalkan masih berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, bakat dan minat peserta didik (Rosnita, 2011).

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, kurikulum adalah proses kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk menyusun suatu rencana agar terorganisir dengan baik dan terarah seperti dalam kurikulum pendidikan yang dibuat untuk mengatur dan mengarahkan proses pendidikan sesuai aturan yang berlaku agar mencapai suatu keberhasilan.

C. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis untuk mengacu ketercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan (Aliyyah, et all, 2020, hal. 38). Manajemen kurikulum berkenaan dengan bagaimana kurikulum dirancang, diimplementasikan (dilaksanakan), dan dikendalikan (dievaluasi dan disempurnakan), oleh siapa, kapan, dan dalam lingkup mana. Manajemen kurikulum juga berkaitan dengan kebijakan siapa yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengendalikan kurikulum. Dari sudut mana pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan kurikulum. Secara umum, dibedakan antara manajemen pengembangan kurikulum terpusat (*centralized curriculum development management* atau *top down curriculum development*) dan manajemen pengembangan kurikulum tersebar (*desentralized curriculum development management* atau *bottom up curriculum development*) (Triwiyanto, 2015, hal. 25).

Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematis yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan (Muhammad Kristiawan, 2017). Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah (MBS) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam mengelola kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan

misi lembaga pendidikan tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan (Rusman, 2009).

Kegiatan pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan ilmu manajemen karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan, bahkan termasuk monitoring dan evaluasi. Ilmu manajemen harus menjadi landasan pokok dalam studi pengembangan kurikulum. Di dalam ilmu manajemen dan kurikulum terdapat satu faktor kunci (*key factor*) yang sama dan harus ada, yaitu orang (*people*). Artinya, seindah apa pun desain kurikulum pada akhirnya terletak di tangan guru. Keberhasilan manajemen kurikulum sangat dipengaruhi oleh faktor manusianya, mulai dari tingkat top leader (di tingkat pusat) sampai dengan tingkat pelaksana di lapangan (guru). Tentu dalam pelaksanaannya orang tersebut harus didukung oleh sumber-sumber lain, seperti sarana dan prasarana, biaya, waktu, teknologi, termasuk kemampuan manajerialnya (Arifin, 2011, hal. 25–26).

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, manajemen kurikulum adalah suatu pengelolaan yang dirancang untuk mengatur dan mengarahkan suatu kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah agar berjalan dengan baik atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik dan sistematis demi tercapainya tujuan kurikulum.

D. Manajemen Kurikulum (KTSP)

Dalam pengembangan kurikulum di tingkat sekolah, pada tingkat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) disebutkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 15 bahwa “Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan”. Selanjutnya pada pasal 1, disebutkan bahwa “Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di

bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK.” (Wahyudin D. H., 2014, hal. 12).

Pada satuan pendidikan kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (SK atau KD) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada. Berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum yakni sebagai berikut:

1. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berassasnya demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
3. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat.
5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum (Wahyudin D. H., 2014, hal. 13).

Dalam konteks Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP), dijelaskan secara operasional bahwa siklus manajemen kurikulum pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari empat tahap berikut:

1. Tahap perencanaan, meliputi langkah-langkah sebagai: a) analisis kebutuhan; b) merumuskan dan menjawab filosofis; c)

menentukan desain kurikulum dan isi program; d) membuat rencana induk (*master plan*): pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian.

2. Tahap pengembangan, meliputi langkah-langkah: a) perumusan rasional atau dasar pemikiran; b) perumusan visi, misi, dan tujuan; c) penentuan struktur dan isi program; d) pemilihan dan pengorganisasian materi; e) pengorganisasian kegiatan pembelajaran; e) pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar; dan f) penentuan cara mengukur hasil belajar.
3. Tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi langkah-langkah: a) penyusunan rencana dan program pembelajaran (Silabus, RPP; Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); b) penjabaran materi (kedalaman dan keluasan); c) penentuan strategi dan metode pembelajaran; d) penyediaan sumber alat, dan sarana pembelajaran; e) penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar; f) setting lingkungan pembelajaran (Wahyudin D. H., 2014, hal. 13).

Tahap penilaian, terutama dilakukan untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup konteks, *input*, proses, produk (CIPP). Penilaian konteks: memfokuskan pada pendekatan sistem dan tujuan, kondisi aktual, masalah-masalah dan peluang. Penilaian *input*: memfokuskan pada kemampuan sistem, strategi pencapaian tujuan, implementasi *design* dan *cost benefit* dari rancangan. Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan dalam melaksanakan program. Penilaian produk berfokus pada mengukur pencapaian proses dan pada akhir program (identik dengan evaluasi sumatif) (Wahyudin D. H., 2014, hal. 14).

BAB II

PERAN DAN FUNGSI KURIKULUM

A. Peran Kurikulum

Kurikulum berperan dalam pencapaian tujuan pendidikan, yaitu memiliki peran konservatif, kreatif, kritis, dan evaluasi. Kurikulum mencerminkan keinginan, cita-cita, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat. Sekolah didirikan oleh dan untuk masyarakat, sudah sewajarnya pendidikan memerhatikan dan merespons suara rakyat (Nasution, S, 2012). Kurikulum bukan merupakan segala sesuatunya dalam suatu sistem pendidikan. Kurikulum merupakan alat mencapai suatu tujuan dan membutuhkan kendaraan penggunaannya. Sama seperti kendaraan, banyak ketidaksempurnaan dalam setiap kurikulum. Dalam perspektif kepentingan bangsa dan negara, kendaraan kurikulum ini akan berfungsi dan berperan baik jika para pelaku dan pemerhati memiliki kejelasan tujuan dan visi bersama, peta jalan yang benar, serta keandalan dalam pemanfaatan kendaraan, yang biasa diaplikasikan dalam pembelajaran (Lie, 2013, hal. 80).

Kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai pendidikan merupakan hal yang penting, meskipun para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kurikulum. Ada yang mempunyai pandangan sempit yang mengartikan kurikulum sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran, ada pula yang berpandangan sangat luas mengartikan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang disediakan dan menjadi tanggung jawab sekolah. Meskipun pandangan tersebut berbeda-beda, tetapi mengandung hal yang sama bahwa kurikulum merupakan rancangan dan pelaksanaan pendidikan

atau pengajaran (Engkoswara dan A. Komariah, 2010, hal. 249).

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang cukup sentral dalam seluruh kegiatan pendidikan, menentukan proses pelaksanaan dan hasil pendidikan (Sukmadinata, Nana Syaodih, 2001, hal. 38). Berdasarkan hal tersebut, kurikulum membutuhkan landasan yang kuat dalam perancangannya. Kajian-kajian filosofis, psikologis, sosial, budaya, perkembangan ilmu dan teknologi sangat diperlukan sebagai fondasi kurikulum. Kurikulum sebagai sistem memiliki komponen-komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi (Sanjaya, Wina dan D. Andayani., 2011, hal. 46).

Sebagai program pendidikan yang telah direncanakan secara sistematis, kurikulum mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan siswa. Apabila dianalisis sifat dari kebudayaan, dengan sekolah sebagai institusi sosial dalam melaksanakan operasinya, maka menurut (Hamalik, 2007, hal. 11), terdapat tiga jenis peranan kurikulum yang dinilai sangat penting, yaitu “peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif, dan peranan kreatif”. Peranan konservatif, yaitu peranan kurikulum untuk mewariskan, mentranmisikan dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat. Salah satu tanggung jawab kurikulum adalah mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada generasi muda. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai positif dan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di masa yang akan datang. Sekolah sebagai pranata sosial harus dapat memengaruhi dan membimbing tingkah laku peserta didik sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, sebagai salah satu lembaga sosial dapat mempengaruhi dan membina tingkah laku siswa sesuai dengan berbagai nilai sosial yang ada dalam masyarakat, sejalan dengan peranan pendidikan sebagai suatu proses sosial. Dengan adanya peran konservatif ini, maka sesungguhnya kurikulum berorientasi pada masa lampau. Meskipun demikian peranan ini sangat mendasar sifatnya.

Peranan kritis dan evaluatif, yaitu peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial-budaya yang akan diwariskan

kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Asumsinya adalah nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat akan selalu berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan nilai-nilai tersebut belum tentu relevan dengan karakteristik budaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tidak relevan tentu harus dibuang dan diganti dengan nilai-nilai budaya baru yang positif dan bermanfaat. Disinilah peran kritis dan evaluatif kurikulum sangat diutamakan. Jangan sampai peserta didik kita terkontaminasi oleh nilai-nilai budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam hal ini, kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan memberikan penekanan pada unsur berpikir kritis.

Peranan kreatif, yaitu peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman belajar yang kreatif, efektif, dan kondusif. Kurikulum harus dapat merangsang pola pikir dan pola bertindak peserta didik untuk menciptakan sesuatu yang baru, sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarga, bangsa dan negara.

Ketiga peran kurikulum tersebut harus berjalan secara seimbang, atau dengan kata lain terdapat keharmonisan diantara ketiganya. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa menuju kebudayaan masa depan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu rencana untuk mengatur penataan mengenai tujuan dari pendidikan. Peran kurikulum menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada untuk memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Hamalik, 2007, hal. 12-13).

B. Fungsi Kurikulum

Fungsi kurikulum ditinjau dalam berbagai perspektif, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Kurikulum dalam Mencapai Tujuan Pendidikan

Fungsi kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan

pendidikan, yaitu alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkatan tujuan pendidikan yang ada di bawahnya. Kurikulum sebagai alat dapat diwujudkan dalam bentuk program, yaitu kegiatan dan pengalaman belajar yang harus dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Program tersebut harus dirancang secara sistematis, logis, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Kurikulum bagi Kepala Sekolah

Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah merupakan pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Pengaturan kegiatan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih, seperti jenis program pendidikan apa yang sedang dan akan dilaksanakan, bagaimana prosedur pelaksanaan program pendidikan, siapa orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan, kapan dan di mana program pendidikan akan dilaksanakan. Bagaimana kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai administrasi kurikulum dan mengontrol kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di sinilah pentingnya pemerintah melibatkan kepala sekolah dalam merancang kurikulum, termasuk sosialisasi kurikulum baru.

3. Fungsi Kurikulum bagi Setiap Jenjang Pendidikan

Fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan adalah a) fungsi kesinambungan, yaitu sekolah pada tingkat yang lebih atas harus mengetahui dan memahami kurikulum sekolah yang dibawahnya, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kurikulum, b) fungsi penyiapan tenaga, yaitu bilamana sekolah tertentu diberi wewenang mempersiapkan tenaga-tenaga terampil, maka sekolah tersebut perlu mempelajari apa yang diperlukan oleh tenaga terampil, baik kemampuan akademik, kecakapan atau keterampilan, kepribadian maupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

4. Fungsi Kurikulum bagi Guru

Dalam praktik, guru merupakan ujung tombak pengembangan kurikulum sekaligus sebagai pelaksana kurikulum di lapangan. Guru juga sebagai faktor kunci (*key factor*) dalam keberhasilan suatu kurikulum. Bagaimanapun baiknya suatu kurikulum disusun, pada akhirnya akan sangat bergantung pada kemampuan guru di lapangan. Efektivitas suatu kurikulum tidak akan tercapai, jika guru tidak dapat memahami dan melaksanakan kurikulum dengan baik sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Artinya, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengembang kurikulum, tetapi juga sebagai pelaksana kurikulum.

5. Fungsi Kurikulum bagi Pengawas (*Supervisor*)

Bagi para pegawai, fungsi kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman, patokan atau ukuran dalam membimbing kegiatan guru di sekolah. Kurikulum dapat digunakan pengawasan untuk menetapkan hal-hal apa saja yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Para pengawas harus bersikap dan bertindak secara profesional dalam membimbing kegiatan guru di sekolah. Pengawas juga perlu mencari data dan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum dalam hubungannya dengan peningkatan mutu guru, kelengkapan sarana pendidikan, penetapan sistem administrasi, bimbingan dan konseling, keefektifan penggunaan perpustakaan, dan lain-lain. Implikasinya adalah pengawas harus menguasai kurikulum yang berlaku agar dapat memberikan bimbingan secara profesional kepada guru-guru, terutama dalam pengembangan program pembelajaran dan implementasinya.

6. Fungsi Kurikulum bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, kurikulum dapat memberikan pencerahan dan perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui kurikulum, masyarakat dapat mengetahui apakah pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Masyarakat yang cerdas dan dinamis akan selalu a) memberikan bantuan,

baik moril maupun materil dalam pelaksanaan kurikulum suatu sekolah, b) memberikan saran-saran, usul atau pendapat sesuai dengan keperluan-keperluan yang paling mendesak untuk dipertimbangkan dalam kurikulum sekolah, c) berperan serta secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung. Orang tua juga perlu memahami kurikulum dengan baik, sehingga dapat memberikan bantuan kepada putra-putrinya. Fungsi kurikulum bagi orang tua dapat dijadikan bahan untuk memberikan bantuan, bimbingan dan fasilitas lainnya guna mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Bantuan dan bimbingan yang tidak didasarkan atas kurikulum yang berlaku, dapat merugikan anak, sekolah, masyarakat dan orang tua itu sendiri.

7. Fungsi Kurikulum bagi Pemakai Lulusan

Instansi atau perusahaan manapun yang mempekerjakan tenaga kerja lulusan suatu lembaga tentu menginginkan tenaga kerja yang mutu tinggi dan mampu berkompetensi agar dapat meningkatkan produktivitasnya. Biasanya, para pemakai lulusan selalu melakukan seleksi yang ketat dalam penerimaan calon tenaga kerja. Seleksi dalam bentuk apapun tidak akan membawa arti apa-apa jika instansi tersebut tidak mempelajari terlebih dahulu kurikulum yang telah ditempuh oleh para calon tenaga kerja tersebut. Bagaimanapun, kadar pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki calon tenaga kerja, merupakan produk dari kurikulum yang ditempuhnya. Para pemakai lulusan harus mengenal kurikulum yang telah di tempuh calon tenaga kerja. Studi kurikulum akan banyak membantu pemakaian lulusan dalam tenaga kerja yang andal, energik, disiplin, bertanggung jawab, jujur, ulet, tepat, dan berkualitas (Arifin, 2011, hal. 48).

C. Fungsi Manajemen Kurikulum

Terdapat beberapa fungsi manajemen kurikulum, yaitu (Rusman, 2009):

1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
2. Meningkatkan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang

maksimal dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstra dan kokurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.

3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi pada kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam belajar.
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Disamping itu, guru maupun siswa selalu termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat.

BAB III

LANDASAN KURIKULUM

A. Landasan Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum sebagai suatu disiplin ilmu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Wahyudin D. H., 2014, hal. 19-20):

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 36 menyebutkan bahwa “Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa.”
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 17 ayat 1 dinyatakan bahwa “Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan siswa.” Selanjutnya pada ayat 2 ditegaskan bahwa “sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dan kurikulum dan SKL, dibawah supervisi Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bawah pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan pendidikan dasar dan

menengah.

4. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

Sementara landasan yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum terdiri dari: a) Landasan Filosofis, b) Landasan Psikologis, c) Landasan Sosiologis, dan d) Landasan Teknologis.

B. Landasan Filosofis

Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *philosophia* (*philore* = cinta, senang, suka, dan *sophia* = kebaikan atau kebenaran). Menurut asal katanya, filsafat berarti cinta akan kebenaran. Orang yang berfilsafat adalah orang yang senang dengan kebenaran. Orang yang ahli dalam berfilsafat disebut *philosopher* (Inggris), *failasuf* (Arab), dan filsuf (Indonesia). Dengan demikian, filsuf adalah orang yang cinta akan kebenaran, berusaha untuk mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, dan menciptakan sikap positif terhadapnya, juga mencari hakikat sesuatu, berusaha menghubungkan antara sebab dan akibat serta melakukan penafsiran atas pengalaman-pengalaman manusia. Berfikir filsafat berarti berpikir secara menyeluruh, sistematis, logis, dan radikal. Menyeluruh mengandung arti bahwa filsafat bukan hanya sekadar pengetahuan melainkan juga suatu yang dapat menembus sampai dibalik pengetahuan itu sendiri. Sistematis berarti filsafat menggunakan berpikir secara sadar, teliti dan teratur sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Logis berarti proses berpikir filsafat menggunakan logika dengan sedalam-dalamnya. Radikal berarti berpikir sampai ke akar-akarnya. Meskipun demikian, kebenaran filsafat adalah kebenaran relatif. Artinya, kebenaran itu selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Kebenaran itu dianggap benar jika sesuai dengan ruang dan waktu. Apa yang dianggap benar oleh masyarakat belum tentu benar oleh masyarakat lain meskipun dalam kurun waktu yang sama. Kebenaran filsafat adalah kebenaran yang bergantung sepenuhnya pada kemampuan daya nalar manusia (Arifin, 2011, hal. 47-48).

Secara harfiah filsafat berarti “cinta akan kebijakan” (*love of*

wisdom), untuk mengerti dan berbuat secara bijak, ia harus memiliki pengetahuan, dan pengetahuan yang diperoleh melalui proses berpikir, yaitu berpikir secara mendalam, logis dan sistematis. Adapun yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis dan sistematis (filosofis) dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengembangkan kurikulum. Penggunaan filsafat tersebut lebih baik dalam pengembangan kurikulum dalam bentuk program (tertulis), maupun kurikulum dalam bentuk pelaksanaan (operasional) di sekolah (MKDP, 2006, hal. 23).

Kebenaran filsafat adalah kebenaran yang bergantung sepenuhnya pada kemampuan daya nalar manusia. Menurut Plato dan Aristoteles, pernyataan yang dianggap benar itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Artinya kebenaran berfungsi sebagai ukuran atau suatu peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Jika cocok berarti benar, dan jika tidak cocok berarti tidak benar sebagai kebenaran, itu berarti juga kebenaran relatif sebab bergantung pada faktor ruang dan waktu. John Dewey mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional) menuju ke arah tabiat manusia. dengan demikian, Objek pendidikan yang paling utama dan pertama adalah manusia. Objek filsafat juga adalah manusia. Persamaan objek ini menimbulkan pemikiran dan disiplin ilmu baru yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi teori pendidikan dan pandangan filsafat terhadap pengalaman manusia dalam bidang pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan (Arifin, 2011, hal. 48).

Bidang telaahan filsafat pada awalnya mempersoalkan siapa manusia itu? Kajian terhadap persoalan ini berupaya untuk menelusuri hakikat manusia, sehingga muncul beberapa asumsi misalnya manusia adalah makhluk religius, makhluk sosial, makhluk yang berbudaya, dan lain sebagainya. Dari beberapa telaahan tersebut filsafat menelaan tiga pokok persoalan, yaitu hakikat benar-salah (logika), hakikat

baik-buruk (etika), dan hakikat indah-jelek (estetika). Pada dasarnya pandangan hidup manusia mencangkup ketiga permasalahan tersebut, yaitu logika, etika dan estetika. Oleh karenanya ketiga pandangan tersebut sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam mengembangkan kurikulum khususnya untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan, isi atau materi pendidikan, metodologi atau proses pendidikan, dan sistem evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian pendidikan. Filsafat menentukan arah ke mana peserta didik akan dibawa, filsafat merupakan perangkat, nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat tertentu termasuk yang dianut oleh perorangan sekalipun akan sangat mempengaruhi terhadap pendidikan yang ingin direalisasikan (MKDP, 2006, hal. 23).

Para ahli filsafat membagi ruang lingkup filsafat berbedabeda. ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pemikiran manusia yang amat luas, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar nyata (terlihat), baik material konkret maupun nonmaterial abstrak (tidak terlihat) (Arifin, 2011, hal. 49).

C. Landasan Psikologis

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu dalam pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Pada hakikatnya setiap individu mengalami perkembangan, yaitu perubahan-perubahan yang teratur sejak dari pembuahan sampai mati. Perubahan pada individu dapat terjadi melalui proses kematangan (*maturation*), dan melalui proses belajar (*learning*). Kedua model perubahan yaitu kematangan dan karena proses belajar termasuk kedalam kajian psikologi, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Oleh karena itu sangat naif, jika berbicara proses pengembangan suatu kurikulum baik pada tatanan kurikulum ideal maupun kurikulum dalam dimensi operasional (pembelajaran) tidak memakai kajian

psikologi sebagai dasar pijakan atau landasan berpikir (konsep) maupun dalam prakteknya (MKDP, 2006, hal. 30–31).

Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu yang terlibat di dalamnya, karena apa yang ingin disampaikan menuntut peserta didik untuk melakukan perbuatan belajar atau sering disebut proses belajar. Dalam proses pembelajaran juga terjadi interaksi yang bersifat multiarah antara peserta didik dengan pendidik (guru). Untuk itu, paling tidak dalam pengembangan kurikulum diperlukan dua landasan psikologi, yaitu psikologi belajar dan psikologi perkembangan. Kedua landasan ini dianggap penting terutama dalam memilih dan menyusun isi kurikulum, proses pembelajaran dan hasil belajar yang diinginkan. Berikut penjelasan mengenai psikologi belajar dan psikologi perkembangan, yaitu:

1. Psikologi Belajar

Psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana peserta didik melakukan pembuatan belajar. Pengertian belajar banyak ragamnya, bergantung pada teori belajar yang dianut. Namun demikian, secara umum belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan tingkah laku karena interaksi individu dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku dapat berbentuk pengetahuan, keterampilan, sikap atau nilai-nilai. Perubahan tingkah laku karena insting, kematangan atau pengaruh zat-zat kimia tidak termasuk pembuatan belajar (Arifin, 2011, hal. 56).

2. Psikologi Perkembangan

Tujuan akhir pendidikan adalah agar peserta didik menjadi manusia-manusia terdidik. Asumsinya, setiap peserta didik dapat dibimbing, dilatih, dan dididik (*educable*). Jika terjadi kegagalan berarti kegagalan guru, orang tua, dan masyarakat, bukan kegagalan peserta didik karena tidak ada peserta didik yang *unteachable*. Untuk menjadi manusia terdidik tentu peserta didik tidak dapat hanya mengikuti pendidikan formal saja melainkan harus ditopang dengan pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Tidak hanya mempelajari pendidikan umum saja melainkan pendidikan agama, pendidikan kejuruan, pendidikan teknologi, pendidikan bahasa dan

seni, pendidikan humaniora dan lain-lain sesuai dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. Seseorang dapat menjadi manusia yang terdidik apabila ia sudah mencapai kematangan. Kematangan hanya dapat dicapai melalui kehidupan orang dewasa dan kedalaman pengalaman (Arifin, 2011, hal. 58).

D. Landasan Sosiologi

Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia yang berbudaya. Disisi lain bahwa pendidikan merupakan usaha menyiapkan subjek didik (siswa) menghadapi kehidupan yang selalu mengalami perubahan dengan pesat dan bahkan sulit untuk ditebak. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang (MKDP, 2006, hal. 39).

Dalam kurikulum 1984 dan kurikulum 1994 dikembangkan sebuah konsep yang disebut muatan lokal (*local content*) kemudian disempurnakan lagi dalam kurikulum 2004 yang disebut dengan kecakapan hidup (*life skills*). Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia berorientasi pada pola kehidupan masyarakat.

1. Masyarakat sebagai Suatu Sistem

Pada dasarnya masyarakat adalah sebuah sistem yang memiliki tiga subsistem, yaitu subsistem budaya (*cultural system*), subsistem sosial (*social system*), dan subsistem kepribadian (*personality system*). Sistem budaya berisi nilai-nilai, norma, pengetahuan dan kepercayaan atau keyakinan hidup yang dianut bersama (*shared*). Sosiologi mengenal dua kategori status sosial, yaitu (a) *ascribed status*, yaitu status yang diperoleh sejak lahir atau sebagai akibat perkembangan usia, seperti laki-laki atau perempuan, bangsawan atau rakyat jelata, brahmana atau ksatria, sebagai anak-anak atau orang dewasa, dan (b) *achieved status*, yaitu status yang diperoleh karena hasil usaha orang yang bersangkutan, seperti guru, dosen, karyawan, dokter, pengusaha, dan lain sebagainya. Dalam

sistem kepribadian, individu memiliki keperluan atau kebutuhan yang lahir atau dibentuk pada saat berlangsungnya proses sosialisasi dirinya. Dalam masyarakat terdapat juga hierarki pengawasan, dimana kebudayaan mengontrol masyarakat dan masyarakat mengontrol individu-individu yang menjadi warganya (Arifin, 2011, hal. 67).

2. Pendidikan Sebagai Pranata Sosial

Pranata dapat diartikan sebagai lembaga (*intitution*). Pendidikan sebagai pranata sosial berarti pendidikan sebagai lembaga sosial. Kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem terdiri atas berbagai pranata sosial yang merupakan subsistem-subsistem kehidupan, yaitu keluarga, ekonomi, pendidikan, politik, TNI/Polri, kesenian, agama dan rekreasi. Subsistem-subsistem tersebut dapat berperan juga sebagai sistem yang juga memiliki seperangkat subsistem. Antara subsistem pendidikan dengan subsistem yang lain juga terdapat hubungan yang sangat erat dan mendasar. Oleh sebab itu, pendidikan sebagai pranata sosial dan kurikulum sebagai alatnya harus dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan berbagai kehidupan di masyarakat (Arifin, 2011, hal. 69).

3. Pendidikan dan Kehidupan Ekonomi

Banyak hasil penelitian yang menunjukkan terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dengan kehidupan ekonomi. Artinya, semakin tinggi persoalan makin tinggi pula tingkat kehidupan ekonomi. Fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan generasi muda untuk mengisi lapangan kerja yang produktif; seperti pegawai negeri, berdagang, mengelola yayasan pendidikan, bertani, berternak, memberikan bimbingan, teknisi komputer, dan sebagainya. Untuk itu pengembangan kurikulum harus dapat mencapai berbagai tujuan dan menyediakan berbagai tenaga ahli dalam berbagai bidang.

Dalam masyarakat dengan sistem ekonomi tradisional lebih banyak menyediakan model-model cara kerja untuk ditiru oleh generasi pemerus. Artinya, mereka mengamati dan mempelajari berbagai kegiatan kemudian langsung mempraktikkannya (sistem magang). Sementara itu, dalam masyarakat yang memiliki sistem perekonomian modern, pendidikan dilaksanakan bagi orang dewasa

dalam berbagai bidang kehidupan secara terorganisasi melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan, pendidikan dan latihan, kursus singkat, seminar, dan sebagainya (Arifin, 2011, hal. 70).

4. Pendidikan dan Perubahan Sosial

Berbagai peran pendidikan dalam perubahan sosial menimbulkan fenomena baru yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak yang terkait. Dasar pemikirannya adalah sebagai berikut:

- a. Banyak orang dari desa agraris yang mampu menyekolahkan putra-putrinya ke kota dalam bidang agrikultur. Setelah lulus anak tersebut tidak mau pulang ke desanya, karena merasa tidak cocok lagi dengan lingkungan desa yang agraris tersebut, sehingga terjadilah urbanisasi.
- b. Masyarakat yang cenderung ingin memperoleh “gelar akademik”, mulai dari tingkat sarjana, magister sampai dengan doktor, bahkan ada juga yang ingin membeli jabatan fungsional dosen, yaitu guru besar (profesor) dengan cara apapun.
- c. Dalam masyarakat yang sedang dan terus berkembang seperti Indonesia, pendidikan formal bergerak mengikuti perkembangan masyarakat, bukan membimbing atau menuntut perkembangan masyarakat. Fungsi pendidikan hanya bersifat adaptif, yaitu memberikan kemampuan beradaptasi terhadap suatu keadaan (Arifin, 2011, hal. 72).

5. Pendidikan di Lingkungan Keluarga

Para ahli pendidikan Kontemporer mengakui bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup, mulai dari bayi sampai akhir hayat. Para ahli pendidikan juga mengakui peran penting pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan, yang untuk pribadi yang terintegrasi dan holistik sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Hasil dari suatu pendidikan, di manapun tempatnya, harus mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, sangat keliru jika dikatakan bahwa pendidikan di lingkungan keluarga

hanya menekankan domain afektif saja, pendidikan di lingkungan persekolahan hanya menekankan kognitif saja, dan pendidikan luar sekolah hanya menekankan domain psikomotor saja. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga merupakan unit sosial terkecil tetapi bersifat universal. Maksudnya, keluarga terdapat di masyarakat manapun yang ada di dunia ini. George Peter Murdock mengemukakan empat fungsi keluarga yang bersifat universal, yaitu a) sebagai Pranata yang membenarkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang terikat oleh perkawinan, b) mengembangkan keturunan, c) melaksanakan pendidikan, dan d) sebagai kesatuan ekonomi. Keempat fungsi ini harus berada dalam satu kesatuan yang utuh, dalam satu keluarga dan merupakan kriteria pembeda antara keluarga dengan unit-unit sosial lainnya (Arifin, 2011, hal. 73-74).

Pengembangan kurikulum harus memperhatikan unsur-unsur pendidikan informal, seperti peran orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan kepentingan peserta didik yang akan datang, antara lain sebagai calon Ayah atau Ibu yang akan mendidik putra-putrinya. Pengembangan kurikulum harus dapat membekali kemampuan yang cukup kepada peserta didik agar ia menyadari sepenuhnya peran penting sebagai orang tua dalam mendidik putra-putrinya (Arifin, 2011, hal. 74).

E. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Teknologi pada hakikatnya adalah penerapan ilmu pengetahuan. Teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan budaya manusia. Salah satu indikator kemajuan peradaban manusia dapat diukur dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi banyak digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien dan sinergis terhadap pola perilaku manusia. Produk teknologi tidak selalu berbentuk fisik, seperti komputer, televisi, radio, film dan sebagainya. Tetapi juga nonfisik, seperti prosedur pembelajaran, sistem evaluasi, teknik mengajar dan sebagainya. Produk teknologi tersebut banyak digunakan dalam pendidikan sehingga memberikan

pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses dan hasil pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi terbentuk karena adanya karya-karya pikir manusia. sifatnya yang lebih objektif dan fenomena-fenomena alam, baik mengenai benda-benda, makhluk hidup maupun mengenai kehidupan masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk informasi lebih mudah meresapi kebudayaan yang ada di tiap masyarakat yang terjangkau atau dapat menjangkaunya. Informasi jenis lain dalam budaya manusia yang sarat dengan interpretasi subjektif dari masyarakat yang menghasilkan budaya itu, pada umumnya tidak dapat meresapi budaya masyarakat lain semudah informasi ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi cepat menyebar luas, terutama segi-segi yang sangat terasa kegunaannya dan dapat langsung serta mudah digunakan (Arifin, 2011, hal. 76-77).

Jadi dilihat dari pemanfaatan teknologi, masyarakat Indonesia sampai saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jika dilihat dari produksi teknologi, bangsa Indonesia masih jauh ketinggalan dari negara Eropa maupun negara Asia. Padahal, sumber daya Indonesia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, sangat potensial kuantitas maupun kualitasnya dibandingkan dengan beberapa negara tetangga lain. Implikasinya adalah pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru Sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. Pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri (Arifin, 2011, hal. 78).

BAB IV

MODEL-MODEL KURIKULUM

A. Model Kurikulum

Kurikulum dapat dikategorikan ke dalam empat model umum, yaitu humanistik, rekonstruksi sosial, teknologi, dan akademik. Masing-masing model memiliki perbedaan dalam hal yang harus diajarkan, oleh siapa diajarkan, kapan, dan bagaimana mengajarkannya (Hamalik, 2007, hal. 143–149).

1. Kurikulum Humanistik

Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam perkembangan individu. Bagi para pendukung kurikulum humanistik, tujuan pendidikan adalah suatu proses atas diri individu yang dinamis, yang berkaitan dengan pemikiran, integritas, dan otonominya. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya, untuk perkembangan individu peserta didik itu selanjutnya. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a) Mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif;
- b) Menghormati individu peserta didik, dan
- c) Tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat.

Dalam pendekatan humanistik, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Guru seharusnya dapat menyediakan kegiatan yang memberikan alternatif pengalaman belajar

bagi peserta didik. Evaluasi kurikulum humanistik berbeda dengan evaluasi pada umumnya, yang lebih ditekankan pada hasil akhir atau produk. Sebaliknya, evaluasi kurikulum humanistik lebih memberi penekanan pada proses yang dilakukan. Kurikulum ini melihat kegiatan sebagai sebuah manfaat untuk peserta di masa depan. Kelas yang baik akan menyediakan berbagai pengalaman untuk membantu peserta didik menyadari potensi mereka dan orang lain, serta dapat mengembangkannya.

2. Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum rekonstruksi sosial sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi. Banyak prinsip kelompok ini yang konsisten dengan cita-cita tertinggi, contohnya masalah hak asasi kaum minoritas, keyakinan dalam intelektual masyarakat umumnya, dan kemampuan menentukan nasib sendiri sesuai arahan yang mereka inginkan. Kurikulum rekonstruksi sosial bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusiadan kemanusiaan. Para pendukung kurikulum ini yakin, bahwa permasalahan yang muncul tidak harus diperhatikan oleh “pengetahuan sosial” saja, tetapi oleh setiap disiplin ilmu, termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dalam rekonstruksi sosial antara lain melibatkan:

- a) Survei kritis terhadap suatu masyarakat;
- b) Studi yang melibatkan hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internaasional;
- c) Studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal;
- d) Berbagai pertimbangan perubahan politik, dan
- e) Pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Dalam kurikulum rekonstruksi sosial, guru berperan menghubungkan, guru berperan menghubungkan tujuan peserta didik dengan manfaat lokal, nasional, dan internasional. Para peserta didik diharapkan dapat menggunakan minatnya dalam menemukan jawaban atas permasalahan sosial yang dibahas di kelas.

3. Kurikulum Teknologi

Perspektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektivitas program metode dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi memengaruhi kurikulum dalam dua cara, yaitu aplikasi dan teori. Aplikasi teknologi merupakan suatu rencana penggunaan beragam alat dan media, atau tahapan basis instruksi. Sebagai teori, teknologi digunakan dalam pengembangan dan evaluasi material kurikulum dan instruksional. Pandangan pertama menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi lebih diarahkan pada bagaimana mengajarkannya, bukan apa yang diajarkan. Adapun pandangan kedua menyatakan bahwa teknologi diarahkan pada penerapan tahap instruksional.

Inti dari kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh peserta didik seharusnya dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. Meskipun demikian, masih ada tiga permasalahan yang belum terpecahkan dalam kurikulum teknologi, yaitu:

- a) Kesalahan hierarki dalam prasyarat dan standar pemisahan dari penguasaan belajar;
- b) Ketidaktepatan penerapan dalam situasi yang tidak pasti; dan
- c) Keterbatasan konsep individualisasi.

Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum, dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Oleh karenanya sangat beralasan bahwa dewasa ini semakin banyak kurikulum efektif yang selaras dengan perkembangan teknologi.

4. Kurikulum Akademik

Dari waktu ke waktu, para ahli akademik terus mencoba mengembangkan sebuah kurikulum yang akan melengkapi peserta didik untuk masuk ke dunia pengetahuan, dengan konsep dasar dan metode untuk mengamati, hubungan antar-sesama, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Mereka menginginkan peserta didik berlaku layaknya seorang ahli fisika, biologi, atau sejarawan. Oleh karena itu, sebagai anggota masyarakat mereka perlu mengikuti perkembangan

disiplin ilmu, dengan memahami dan mendukungnya, dan jika perlu melanjutkan studinya, untuk menjadi seorang ahli dalam bidang tertentu.

Satu kelemahan dalam pendekatan ini adalah kegagalan dalam memberikan perhatian pada yang lainnya, dan melihat bagaimana isi dan disiplin dapat membawa mereka pada permasalahan kehidupan modern yang kompleks, yang tidak dapat dijawab oleh hanya satu ilmu saja.

B. Model-Model Pengembangan Kurikulum

Model atau konstruksi merupakan ulasan teoritis suatu konsepsi dasar. Dalam pengembangan kurikulum, model dapat merupakan ulasan teoritis tentang suatu proses kurikulum secara menyeluruh atau dapat pula merupakan ulasan tentang salah satu bagian kurikulum. Disamping itu, ada model yang mempersoalkan keseluruhan proses dan ada pula yang hanya menitikberatkan pandangannya pada mekanisme penyusunan kurikulumnya. Ulasan teoritis demikian dapat pula hanya mengutamakan uraiannya pada segi organisasi kurikulum dan ada pula yang menitikberatkan ulasanya hanya pada hubungan antar pribadi orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Aplikasi model-model sebaiknya didasarkan pada faktor-faktor konstan, sehingga ulasan tentang model yang dibahas dapat terungkap secara konsisten. Dasar pemikiran ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis model kurikulum (Arifin, 2011, hal. 138).

Delapan model pengembangan kurikulum. Dasar teoritisnya adalah institusi atau orang yang menyelenggarakan pengembangan, pengambilan keputusan, penetapan ruang lingkup kegiatan yang termuat dalam kurikulum, realitas implementasinya, pendekatan permasalahan dengan cara pelaksanaannya penelitian sistematis tentang masalahnya, dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kurikulum (Zais, 1976).

Secara singkat, model-model tersebut akan dikemukakan sebagai berikut:

1. *The Administrative (Line-Staff) Model*

Model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat umum dikenal adalah model administratif karena model ini menggunakan prosedur “garis – staf” atau garis komando “dari atas ke bawah” (*top-down*). Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi (Kemdiknas), kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Dalam model ini, pejabat pendidikan membentuk panitia pengarah (*Steering committee*) yang biasanya terdiri atas pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan guru-guru inti. Panitia pengarah ini bertugas merumuskan rencana umum, prinsip-prinsip, landasan filosofis dan tujuan umum pendidikan.

Selanjutnya, mereka membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai dengan keperluan. Anggota-anggota kelompok kerja umumnya terdiri atas guru-guru dan spesialis-spesialis kurikulum. Tugasnya adalah merumuskan tujuan kurikulum yang spesifik, menyusun materi, kegiatan pembelajaran, sistem penilaian, dan sebagainya sesuai dengan kebijakan *steering committee*. Hasil pekerjaannya direvisi oleh panitia pengarah, dan keanggotaannya terdiri atas sebagian besar kepala-kepala sekolah. Apabila pekerjaan itu telah selesai, diserahkan kembali kepada panitia pengarah untuk ditelaah kembali, baru kemudian diimplementasikan.

2. *The Gras-Roots Model*

Inisiatif pengembangan kurikulum dalam model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada dua pandangan pokok, yaitu: *Pertama*, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah dari sejak semula terlibat secara langsung dalam pengembangan kurikulum. *Kedua*, pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personal yang profesional (guru) saja, tetapi juga siswa, orang tua, dan anggota masyarakat. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum demikian, kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat sangatlah penting. Kerja sama di antara sesama guru dengan sendirinya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari model ini.

Model *grass-roots* ini didasarkan atas empat prinsip, yaitu: a) kurikulum akan bertambah baik, jika kemampuan profesional guru bertambah baik; b) kompetensi akan bertambah baik, jika guru terlibat secara pribadi di dalam merevisi kurikulum; c) jika guru terlibat dalam merumuskan tujuan yang ingin dicapai, meyeleksi, mendefinisikan dan memecahkan masalah, mengevaluasi hasil, maka hasil pengembangan kurikulum akan lebih bermakna; dan d) hendaknya di antara guru-guru terjadi kontak langsung sehingga mereka dapat saling memahami dan mencapai suatu konsensus tentang prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan rencana.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, para administrator cukup memberikan bimbingan dan dorongan saja, sehingga guru-guru dapat melaksanakan tugas pengembangan kurikulumnya secara demokratis. Biasanya pada langkah-langkah yang telah berhasil dicapai dan menyiapkan program selanjutnya. Dalam lokakarya ini, selain guru-guru ada juga kepala sekolah, orang tua murid, tokoh masyarakat, konsultan, dan sumber-sumber lainnya.

3. *The Demonstration Model*

Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbaharui kurikulum. Demonstrasi terdiri atas dua bentuk, yaitu:

- a. Dalam bentuk pertama yang cenderung bersifat formal, sekelompok guru diorganisasikan dalam suatu sekolah secara terpisah. Tugas mereka adalah mengembangkan proyek percobaan kurikulum. Tujuan sama seperti tim penelitian dan pengembangan secara internal, yaitu untuk menghasilkan segmen baru dalam kurikulum, dengan harapan hasilnya dapat diadopsi oleh kurikulum sekolah. Dalam bentuk pertama ini, insiatif dan organisasi kurikulum berasal dari atas sehingga model ini dianggap sebagai representasi variasi model administratif.
- b. Dalam bentuk kedua dianggap kurang formal dibandingkan

dengan bentuk pertama karena guru-guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada membuat eksperimen di dalam area tertentu. Mereka bekerja dalam bentuk organisasi tak terstruktur atau bekerja sendiri-sendiri. Tujuannya untuk menghasilkan alternatif praktik kurikulum. Tujuannya untuk menghasilkan alternatif praktik kurikulum. Jika eksperimen berhasil, maka diusulkan untuk diadopsi penggunaannya di seluruh sekolah (Smith, 1957).

Dengan demikian, model demonstrasi dapat dilaksanakan baik secara formal maupun tidak formal. Keuntungan model demonstrasi antara lain: 1) disebabkan kurikulum yang dihasilkan telah melalui uji coba dalam praktik yang nyata, maka dapat memberikan alternatif yang dapat bekerja, 2) perubahan kurikulum pada bagian tertentu cenderung lebih mudah disepakati dan diterima daripada perubahan secara keseluruhan, 3) mudah untuk mengatasi hambatan, dan 4) menempatkan guru sebagai pengambilan inisiatif dan narasumber sehingga para administrator dapat mengarahkan minat dan kebutuhan guru untuk mengembangkan program-program baru. Kelemahan utama model ini adalah dapat menghasilkan antagonisme baru. Guru-guru yang tidak terlibat di dalam proses pengembangan cenderung bersikap apatis, curiga, tidak percaya, dan cemburu. Akhirnya, mereka akan menerima kurikulum baru itu dengan setengah hati.

4. *Beauchamp's System Model*

Limaa langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, yaitu: a) menentukan arena pengembangan kurikulum. Arena itu bisa berupa kelas, sekolah, sistem persekolahan regional atau sistem pendidikan nasional. b) Penentuan arena tersebut sangat memengaruhi langkah selanjutnya; memilih dan mengikutsertakan pengembangan kurikulum, yang terdiri atas spesialis kurikulum, perwakilan kelompok-kelompok profesional dan guru-guru kelas yang terpilih, semua tenaga profesional yang ada dalam sistem sekolah tersebut, dan kelompok masyarakat yang representatif. Penentuan orang-orang yang terlibat disesuaikan dengan arena pengembangan kurikulum; c) pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi menetapkan tujuan kurikulum, memilih

materi pelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan desain. Untuk itu, perlu ditempuh: membentuk dewan kurikulum sebagai koordinator umum penyusunan kurikulum, evaluasi kurikulum yang sedang berjalan, menentukan alternatif materi pelajaran baru, menentukan kriteria keputusan tentang apa yang akan dimasukkan ke dalam kurikulum, dan merancang kurikulum baru; d) pelaksanaan kurikulum secara sistematis; dan e) evaluasi kurikulum, yang meliputi empat dimensi: penggunaan kurikulum oleh guru, desain kurikulum, hasil belajar peserta didik, dan sistem kurikulum (Beauchamp, 1975).

5. *Taba's Inverted Model*

Dikatakan terbalik karena model ini merupakan cara yang lazim ditempuh secara deduktif sehingga model ini sifatnya lebih induktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum, sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Lima langkah pengembangan kurikulum secara berurutan, yaitu a) kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum untuk dieksperimenkan. Untuk menghasilkan unit-unit itu ditempuh cara diagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan khusus, memilih materi, mengorganisasikan materi, memilih pengalaman belajar, mengevaluasi, dan mengecek keseimbangan dan urutan materi, b) uji coba unit-unit eksperimen untuk menemukan validitas dan kelayakan pembelajaran, c) merevisi hasil uji coba dan mengonsolidasikan unit-unit kurikulum, d) mengembangkan kerangka kerja teoritis. Dasar pertimbangan adalah apakah ide-ide dan konsep-konsep pokok secara berurutan telah cukup dalam memperhatikan perimbangan keluasan dan kompleksitasnya? Apakah pengalaman belajar telah membaerikan kesempatan dalam meningkatkan perkembangan keterampilan intelektual dan pemahaman emosional? e) pengasemblingan dan desiminasi hasl yang telah diperoleh. Oleh sebab itu, perlu persiapan guru-guru untuk mengikuti sosialisasi melalui seminar, penataran, pelatihan, lokakarya, dan sebagainya (Taba, 1962).

6. *Roger's Interpersonal Relations Model*

Model ini berasal dari seorang psikolog *Carl Roger*. Dia berasumsi bahwa “ kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luwes, dan adaptif terhadap situasi perubahan”. Kurikulum demikian hanya bisa disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luwes, dan berorientasi proses. Untuk itu diperlukan pengalaman kelompok terdiri at 10-15 orang dengan seorang fasilitator atau pemimpin. Kelompok tersebut hendaknya tidak berstruktur, tetapi harus menyediakan lingkungan yang memungkinkan berkomunikasi interpersonal secara luas.

Langkah-langkah dalam model ini adalah a) memilih suatu sasaran administrator dalam sistem pendidikan deengan syarat bahwa individu yang terlibat hendaknya ikut aktifberpartisipasi dalam kegiatan kelompok secara intensif agar mereka dapat berkenalan secara akrab, b) mengikutsertakan guru-guru dalam pengalaman kelompok secara intensif, c) mengikutsertakan unit kelas dalam pertemuan lima hari. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan pertemuan intensif antara guru dengan peserta didik dan antarpeserta didik lainnya secara akrab dalaam suasana bebas berekspresi, d) menyelenggarakan pertemuan secara interpersonal antara administrator, guru dan orangtua peserta didik. Tujuan utamanya adalah orangtua, guru, dan kepala sekolah bisa saling mengenal secara pribadi sehingga memudahkan pemecahan masalah di sekolah, dan e) pertemuan vertikal yang mendobrak hierarki, birokrasi, dan status sosial. Melalui cara ini, diharapkan keputusan-keputusan dalam pengembangan kurikulum akan lebih mendekati realitas karena diselenggarakan dalam suasana bebas tanpa tekanan.

7. *The Systematic Action-Research Model*

Tiga faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam model ini adalah hubungan manusia, organisasi sekolah, dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Langkah-langkah dalam model ini adalah a) merasakan adanya sesuatu masalah dalam kelas atau sekolah yang perlu diteliti secara mendalam, b) mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya, c) merencanakan secara mendalam tentang bagaimana pemecahan masalahnya, d) menentukan

keputusan-keputusan apakah yang perlu diambil sehubungan dengan masalah tersebut, e) melaksanakan keputusan yang telah diambil dan menjalankan rencana yang telah disusun, f) mencari fakta secara meluas, dan g) menilai tantang kekuatan dan kelemahannya.

8. *Emerging Technical Model.*

Model teknologis ini terdiri atas tiga variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Model analisis tingkah laku memulai kegiatannya dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks secara bertahap. Model analisis sistem memulai kegiatannya dengan jalan menjabarkan tujuan-tujuan secara khusus (output), kemudian menyusun alat-alat ukur untuk menilai keberhasilannya, selanjutnya mengidentifikasi sejumlah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraannya. Model berdasarkan komputer memulai kegiatannya dengan jalan mengidentifikasi sejumlah unit-unit kurikulum lengkap dengan tujuan-tujuan pembelajaran khususnya. Setelah itu, guru dan peserta didik diwawancarai tentang pencapaian tujuan-tujuan tersebut dan data itu disimpan dalam komputer. Data komputer tersebut dimanfaatkan dalam menyusun materi pelajaran untuk peserta didik.

C. Model Kurikulum Berbasis Kompetensi

1. Pengertian Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), yaitu suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan dan penguasaan pada kompetensi bagi peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, orang tua, dan masyarakat baik untuk melanjutkan yang lebih tinggi, memasuki dunia kerja maupun sosialisasi dengan masyarakat. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi dapat menumbuhkan sikap mandiri, tanggung jawab dan partisipasi aktif peserta didik untuk belajar menilai dan memengaruhi kenijakan umum, serta memberanikan diri untuk tampil dalam berbagai kegiatan, baik di sekolah maupun di masyarakat. KBK memberikan keleluasaan pada sekolah untuk menyusun dan

mengembangkan silabus mata pelajaran sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Silabus ini dikembangkan oleh tiap sekolah sehingga memungkinkan keseragaman kurikulum antarsekolah atau wilayah tanpa mengurangi standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 152-153).

Model kurikulum berbasis kompetensi (KBK) mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan model-model lainnya, yaitu:

Pertama, pendekatan ini bersifat alamiah (kontekstual), karena bertitik tolak, berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar, dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan standar kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*). *Kedua*, kurikulum berbasis kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, seperti penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, pengetahuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan pengembangan aspek-aspek kepribadian berdasarkan standar kompetensi tertentu. *Ketiga*, ada bidang-bidamh studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 156).

2. Prinsip dan Komponen KBK

Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut ini.

- a. Keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Keyakinan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat berpengaruh pada sikap dan arti kehidupannya. Keimanan, nilai-nilai, dan budi pekerti luhur perlu digali, dipahami, dan diamalkan oleh peserta didik.
- b. Penguatan integritas nasional yang dicapai melalui pendidikan yang memberikan pemahaman tentang masyarakat Indonesia yang majemuk dan kemajuan peradaban bangsa Indonesia

dalam tatanan peradaban dunia yang multikultur dan multibahasa.

- c. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Keseimbangan pengalaman belajar peserta didik meliputi etika, logika, estetika, dan kinestetika sangat dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum dan hasil belajar.
- d. Kesamaan memperoleh kesempatan. Penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik untuk memperoleh penguasaan, keterampilan, dan sikap sangat diutamakan. Seluruh peserta didik dari berbagai kelompok seperti kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi dan sosial yang memerlukan bantuan khusus, berbakat dan unggul berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya.
- e. Abad pengetahuan dan teknologi informasi. Kemampuan berpikir dan belajar dengan mengakses, memilih, dan menilai pengetahuan untuk mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
- f. Pengembangan keterampilan hidup. Kurikulum perlu memasukkan unsur keterampilan, sikap, dan perilaku adaptif, kooperatif, dan kompetitif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif. Kurikulum juga perlu mengintegrasikan unsur-unsur penting yang menunjang kemampuan untuk bertahan hidup.
- g. Belajar sepanjang hayat. Pendidikan berlanjut sepanjang hidup manusia untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan belajar memahami dunia yang selalu berubah sepanjang hayat dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, serta pendidikan alternatif yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
- h. Berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Upaya memandirikan peserta didik untuk belajar bekerja sama, dan menilai diri sendiri sangat

perlu diutamakan agar peserta didik mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya. Penilaian berkelanjutan dan komprehensif menjadi sangat penting dalam rangka pencapaian upaya tersebut (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 157-158).

3. Pengorganisasian KBK

Dalam implementasi KBK, perlu ada pengorganisasian terhadap komponen terkait, di antaranya sebagai berikut:

a. Kalender Pendidikan

Penyusunan kalender pendidikan selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Kalender pendidikan untuk setiap tahun pelajaran memuat hari efektif belajar antara 200 sampai 240 hari.

b. Diversifikasi Kurikulum

Kurikulum Berbasis Kompetensi dapat didiversifikasi (diperluas), diperdalam dan disesuaikan dengan keberagaman kondisi dan kebutuhan, baik yang menyangkut kemampuan atau potensi peserta didik maupun yang menyangkut potensi lingkungan. Pada dasarnya peserta didik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: normal, sedang, dan tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi yang didiversifikasi untuk masing-masing kelompok peserta didik mempunyai tujuan sebagai berikut:

1) Kelompok Normal

- a) Mengembangkan pemahaman tentang prinsip dan pratikal aplikasi.
- b) Mengembangkan kemampuan pratikal akademik yang berhubungan dengan alam pekerjaan.

2) Kelompok Sedang

- a) Mengembangkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran menggali potensi diri, dan aplikasi pratikal.
- b) Mengembangkan kemahiran akademik dan kemahiran pratikal sehubungan dengan tuntutan dunia kerja ataupun untuk melanjutkan program pendidikan profesional.

3) Kelompok Tinggi

- a) Mengembangkan pemahaman tentang prinsip, teori, dan aplikasi.
- b) Mengembangkan kemampuan akademik untuk memasuki pendidikan tinggi.

Adanya kelompok-kelompok peserta didik tersebut membawa implikasi terhadap penyusunan silabus yang dibuat oleh Dinas Pendidikan setempat atau oleh sekolah sendiri.

4) Penyusunan Silabus

Penyusunan silabus mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi dan perangkat komponen-komponennya yang disusun oleh Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional. Sekolah yang mempunyai kemampuan mandiri dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya setelah mendapat penyusunan dari Dinas Pendidikan setempat (provinsi, kabupaten/kota). Dinas Pendidikan setempat dapat mengoordinasikan sekolah-sekolah yang belum mempunyai kemampuan mandiri untuk menyusun silabus. Penyusunan silabus dapat dilakukan dengan melibatkan para ahli atau instansi yang relevan di daerah setempat seperti tokoh masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta termasuk perusahaan dan industri, atau perguruan tinggi. Bantuan dan bimbingan teknis untuk penyusunan silabus sepanjang diperlukan dapat diberikan oleh Pusat Kurikulum.

5) Kegiatan Kurikuler dan Pendekatan Pembelajaran

Kegiatan kurikuler efektif per-minggu dimungkinkan untuk dilaksanakan dalam lima hari atau enam hari kerja sesuai dengan kebutuhan sekolah setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM). Pendekatan lainnya seperti belajar tuntas, konstruktivisme, pemecahan masalah, berpikir reflektif,

dan multi kecerdasan apabila digunakan dapat memperkaya pendekatan belajar aktif.

6) Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi tuntutan penguasaan bahan kajian dan pelajaran dengan alokasi waktu yang diatur secara tersendiri berdasarkan kebutuhan. Kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa kegiatan pengayaan dan kegiatan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler atau kunjungan studi ke tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan esensi materi pelajaran tertentu. Kegiatan-kegiatan lain yang dapat diselenggarakan di sekolah untuk lebih memantapkan pembentukan kepribadian, yaitu kepramukaan, koperasi, usaha kesehatan sekolah, olahraga, dan palang merah. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan juga untuk mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan kurikuler secara kontekstual dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan.

7) Tenaga Guru

Guru yang mengajar di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah adalah guru kelas yang harus mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar multimata pelajaran. Meskipun demikian, sekolah yang mempunyai kemampuan untuk menyediakan tenaga guru yang cukup jumlahnya dapat melaksanakan pola pembelajaran satu guru untuk satu atau dua mata pelajaran. Guru yang mengajar di sekolah menengah adalah guru mata pelajaran yang mempunyai kualifikasi kompetensi mengajar mata pelajaran yang disertifikasi secara periodik.

8) Sumber dan Sarana Belajar

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran digunakan buku pelajaran, sarana, dan alat belajar yang sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai dalam kurikulum. Peserta didik dapat menggunakan buku pelajaran yang disediakan sekolah, baik buku pemerintah maupun

buku yang diterbitkan oleh penerbit non-pemerintah.

9) Bahasa Pengantar

Pada tahun pertama dan kedua Sekolah Dasar dapat digunakan bahasa ibu yang digunakan oleh sebagian besar peserta didik sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahun ketiga sampai keenam, bahasa Indonesia mutlak digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pembelajaran. Pada jenjang pendidikan menengah, bahasa pengantar pembelajaran untuk mata pembelajaran tertentu selain menggunakan bahasa Indonesia juga dapat digunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lain untuk mata pelajaran yang relevan.

10) Nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila ditanamkan melalui berbagai kegiatan sekolah. Waktu dan cara untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila diatur oleh sekolah. Penanaman nilai-nilai Pancasila mengacu pada kompetensi Pengalaman Nilai-nilai Pancasila yang disediakan oleh Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional.

11) Pendidikan Budi Pekerti

Budi pekerti bukan merupakan mata pelajaran, tetapi lebih merupakan program pendidikan untuk menciptakan kondisi atau suasana kondusif bagi penerapan nilai-nilai budi pekerti. Pendidikan budi pekerti dilaksanakan setiap saat menggunakan kurun waktu berlangsungnya kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan-kegiatan sehari-hari lainnya di lingkungan sekolah dengan melibatkan seluruh masyarakat sekolah (*school society*).

12) Akselerasi Belajar

Akselerasi belajar dimungkinkan untuk diterapkan sehingga peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan materi pelajaran lebih cepat daripada masa belajar yang ditentukan. Akselerasi dapat

dilakukan dengan bantuan modul atau lembar kerja yang disediakan oleh sekolah. Melalui akselerasi belajar, peserta didik yang berkemampuan tinggi dapat mempelajari seluruh materi pelajaran dengan melampaui atau lebih cepat daripada peserta didik yang lainnya.

13) Remedial dan Pengayaan

Sekolah perlu memberikan perlakuan khusus bagi peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial. Peserta didik yang cemerlang diberikan kesempatan untuk tetap mempertahankan kecepatannya yang di atas rata-rata melalui kegiatan pengayaan. Kedua kegiatan tersebut dilakukan oleh sekolah karena sekolah lebih mengetahui dan memahami pencapaian kemajuan tiap-tiap peserta didiknya.

14) Bimbingan dan Konseling Pendidikan

Sekolah berkewajiban memberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang menyangkut tentang pribadi, sosial, belajar, dan karier. Selain guru pembimbing, guru mata pelajaran diperkenankan memfungsikan diri sebagai guru pembimbing dengan syarat memenuhi kriteria pelayanan bimbingan dan karier. Oleh karena itu, guru mata pelajaran harus senantiasa berdiskusi dan berkoordinasi dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK) secara rutin dan berkesinambungan (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 171-175).

4. Sistem Penilaian dan Program Peningkatan Mutu

a. Sistem Penilaian

1) Penilaian Kelas

Penilaian kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik/perbaikan proses pembelajaran dan penentuan kenaikan kelas. Penilaian kelas terdiri atas ulangan harian, pemberian tugas, dan ulangan umum. Bahan penilaian kelas sesuai dengan kalender pendidikan.

2) Tes Kemampuan Dasar

Tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran (program remedial). Tes kemampuan dasar dilakukan pada setiap akhir kelas III.

3) Penilaian akhir Satuan Pendidikan dan Sertifikasi

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapat gambaran secara utuh dan menyeluruh pencapaian ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang divantuumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah.

4) *Benchmarking*

Benchmarking merupakan suatu penilaian terhadap proses dan hasil untuk menuju ke suatu unggulan yang memuaskan. Ukuran keunggulan dapat ditemukan di tingkat sekolah, daerah, atau nasional. Penilaian dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga peserta didik dapat mencapai suatu tujuan keunggulan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan usaha dan keuletannya. Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian *benchmarking* tertentu dapat diadakan penilaian secara nasional yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan. Hasil dari penilaian tersebut dapat dipakai untuk memberi peringkat sekolah dan tidak untuk memberikan nilai akhir peserta didik. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu dasar untuk pembinaan guru dan kinerja sekolah.

5) Penilaian Program

Penilaian program dilakukan secara berkala dan terus-menerus oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi, dan tujuan nasional, serta kesesuaian dengan tuntutan perkembangan

yang terjadi dalam masyarakat (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 175-176).

b. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

1) *Broad-Based Education* yang Berorientasi Life Skill

Program *Broad-Based Education* (BEE) atau pendidikan berbasis masyarakat luas yang berorientasi kecakapan hidup adalah inisiatif pemerintah pusat untuk menjawab berbagai tantangan pendidikan pada masa yang akan datang. Program ini berbasis masyarakat luas karena melayani kebutuhan masyarakat, yakni lulusan sekolah yang memiliki kecakapan hidup. Implementasi program BBE-LS terfokus pada lima hal, yakni 1) reorientasi pembelajaran menuju pembelajaran evaluasi yang efektif, 2) pengembangan budaya sekolah, 4) peningkatan efektivitas manajemen sekolah, 4) penciptaan hubungan yang harmonis dan sinergis antara sekolah dengan masyarakat, dan 5) pengisian muatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Program BBE-LS secara alami berada dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah karena kelima penekanan tersebut berdasarkan pada pengambilan keputusan di level masyarakat sekolah.

2) Pemberian *Block-Grant*

Peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari masalah dana. Oleh karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kewenangan kepala sekolah, antara lain pemberian *Block Grant* yang ditunjukkan langsung ke sekolah. *Block grant* ini diberikan atas dasar *need assessment*, prioritas, perencanaan dan keputusan sekolah bersama masyarakat yang dituangkan dalam proposal sekolah. *Block grant* yang telah diberikan adalah dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) yang merupakan *performance-based grant*, diberikan kepada sekolah yang memiliki potensi nyata untuk meningkatkan kinerja, tetapi terhambat oleh keterbatasan dana.

3) Pemberdayaan MKKS dan MGMP

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) merupakan suatu wadah pertemuan atau perkumpulan kepala sekolah yang berada pada satu wilayah, kabupaten, atau gugus sekolah yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan tukar pengalaman. MKKS sangat diperlukan dalam mewujudkan sekolah efektif. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah menjadi semakin besar sebagai konsekuensi logis dan kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola berbagai perubahan yang menguntungkan bagi peserta didik sekaligus untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pergeseran “*teaching*” menjadi “*learning*” menuntut adanya perubahan proses pembelajaran, baik yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Dengan demikian, diperlukan reorientasi dan revitalisasi penyelenggaraan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), baik dari tujuan penyelenggaraan, jadwal pertemuan, maupun materi.

4) Manajemen Berbasis Sekolah (*School-Based Management*)

Perkembangan menuntut perubahan dalam paradigma pendidikan di Indonesia di Indonesia, yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi, semula pemerintah yang berperan (*governmental role*) menjadi masyarakat yang berperan (*community role*), dan semula berpusat pada guru (*teacher centered*) menjadi berpusat pada anak (*child centered*). Untuk mendukung semua itu, pemerintah sedang dan akan menerapkan berbagai program di sekolah, seperti *school-based management*, *Broad-Based Education*, *life skill education*, dan model akselerasi pembelajaran yang kesemuanya itu terfokus pada peningkatan mutu pendidikan (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 177-179).

D. Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

1. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang di susun oleh dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan kalender pendidikan, dan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencangkul standar kompetensi, kompetensi dasar materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi waktu, dan sumber belajar (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 182).

2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah dibawah kordinasi dan sepervisi dinas pendidikan atau kantor. Departemen agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan menengah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus koordinasi dan supervisi oleh dinas pendidikan provinsi dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang di susun oleh BSNP (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 184).

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Berpusat pada Potensi, Perkembangan, Kebutuhan, dan Kepentingan peserta didik dan Lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

b. Beragam dan Terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

c. Tanggapan terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk didalamnya kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional.

e. Menyeluruh dan Berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian dan mata pelajaran yang direncanakan oleh satuan pendidikan secara berkesinambungan standar jenjang pendidikan.

f. Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan sebagai proses pengembangan kebudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang

berlansung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

- g. Seimbang antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan Kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 185-186).

3. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

- a. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan Pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan berikut:

- 1) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 2) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 3) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya.

- b. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan

dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.

- 1) Kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia
- 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- 3) Kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4) Kelompok mata pelajaran estetika
- 5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 10/2005 pasal 7 Muatan KTSP meliputi sebuah mata pembelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Disamping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri ke dalam isi kurikulum.

(a) Mata Pelajaran

Mata pelajaran serta alokasi waktu untuk masing masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam SI.

(b) Muatan lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kulikuler untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi termasuk keunggulan daerah yang meterinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Subtansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata

pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

(c) Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga pendidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan, antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik, sedangkan untuk kegiatan kepramukaan kepemimpinan dan kelompok ilmiah remaja. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditunjukkan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.

(d) Pengaturan Beban Belajar

(1) Beban belajar dalam sistem digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB/SMK)MAK kategori standar. Beban belajar mandiri dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester

(SKS) digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.

- (2) Jam belajar untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam waktu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, disamping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat didalam struktur kurikulum yang tercantum dalam standar isi.
- (3) Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
- (4) Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik disekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik diluar sekola setara dengan satu jam tatap muka.
- (5) Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem satuan kredit semester (SKS) mengikuti aturan sebagai berikut: a) satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, b)

satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan 25 menit kegiatan mandiri tidak terstruktur.

(e) Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah diterapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ketuntasan untuk tiap indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Suatu pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

(f) Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait. Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: (a) menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (b) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian. Kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; (c) lulus ujian sekolah/ madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (d) lulus ujian nasional.

(g) Penjurusan

Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait.

(h) Pendidikan Kecakapan Hidup

- (1) Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK dapat dimasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, Kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
 - (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.
 - (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.
- (i) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global
- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang dimanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain lain, yang disemuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
 - (2) Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
 - (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

c. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan

sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 188-193).

4. Pengembangan Silabus

a. Pengertian Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

b. Prinsip Pengembangan Silabus.

Prinsip pengembangan silabus meliputi: 1) ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat di pertanggung jawabkan secara keilmuan; 2) relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat keseluruhan dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, nasional, dan spritual peserta didik; 3) sistematis, yaitu komponen komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi; 4) konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian; 5) memadai, yaitu cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar; 6) aktual dan kontekstual, yaitu cankupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi; 7) fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik setaa dinamika perubahan yang terjadi disekolah dan kebutuhan masyarakat; dan 8) menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

c. Unit Waktu Silabus

- 1) Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- 2) Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu pelajaran lain yang sekelompok.
- 3) Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus untuk SMK/MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi.

d. Pengembangan Silabus

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) pada atau pusat kegiatan guru (PKG), dan dinas pendidikan, dengan ketentuan: 1) disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya; 2) apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut; 3) di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI, menyusun silabus secara bersama, di SMP/MTs untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait; 4) sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama dalam mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah dalam lingkup MGMP/PKG setempat; 5) dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing.

e. Langkah langkah Pengembangan Silabus.

- 1) Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi, dengan memperhatikan urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI; keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dan mata pelajaran.
- 2) Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar, dengan mempertimbangkan: pemyensi peserta didik; relevansi dengan karakteristik daerah; tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik; kebermanfaatan bagi peserta didik; struktur keilmuan; aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran; relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan olokasi waktu.
- 3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat berwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Hal hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah; (a) kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional; (b) kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar; (c) ketentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran; (d) rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik yaitu kegiatan peserta didik dan materi.

- 4) Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Kata kerja operasional (KKO) indikator dimulai dari tingkatan berpikir mudah ke sukar, sederhana ke kompleks, dekat ke jauh, dan dari konkret ke abstrak (bukan sebaliknya). Kata kerja operasional pada KD benar benar terwakili dan teruji akurasi pada deskripsi yang ada di kata kerja operasional indikator.
- 5) Menentukan Jenis Penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan notes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan produk, penggunaan portofolio, dan memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar serta peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian, yaitu (a) penilaian yang di arahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi; (b) penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya; (c) sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa; (d) hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran

berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya dibawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan; (e) sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang di tempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan.

- 6) Menentukan Alokasi Waktu pada setiap kompetensi dasar di dasarkan pada jumlah Minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar yang di butuhkan oleh peserta didik yang beragam.
- 7) Menentukan Sumber Belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 193-197).

5. Pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan

a. Analisis konteks

Analisis konteks meliputi; 1) mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP; 2) menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan dan meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program program; 3) menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, Dinas Pendidikan, asosiasi profesi dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

b. Mekanisme Penyusunan

1) Tim Penyusun

Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK terdiri atas guru konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota di dalam kegiatan, tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan narasumber, serta pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/ kota untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan Mi MTS MA dan MAK terdiri atas guru konselor dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah narasumber serta pihak lain yang terkait koordinasi dan supervisi dilakukan oleh Departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus (SDLB SMPLB dan SMALB) terdiri atas guru konselor kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah dan narasumber serta pihak lain yang terkait. supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab dan di bidang pendidikan.

2) Kegiatan

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perancangan sekolah atau Madrasah Kegiatan ini dapat terbentuk rapat kerja atau lokakarya sekolah/madrasah dan atau kelompok sekolah /madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih terperinci dari setiap kegiatan diatur untuk diselenggarakan oleh tim penyusun.

3). Pemberlakuan

Dokumen KTSP pada SD SMP SMA dan SMK

dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

Dokumen KTSP pada MI, MTs dan MA dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite Madrasah dan diketahui oleh Departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama.

Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB dan SMALB dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah serta mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui Dinas Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan (Arifin, Zaenal, 2011, hal. 200-203).

c. Model Kurikulum Bermuatan Lokal

1) Pengertian

Secara umum, pengertian muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keseragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Secara khusus, muatan lokal adalah program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah yang wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah itu (Arifin, 2011, hal. 203).

Implikasi dari pengertian muatan lokal bagi sekolah dan guru, antara lain: a) sekolah harus memanfaatkan sumber-sumber belajar di lingkungan setempat secara efektif dan efisien untuk menunjang pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal, b) sekolah harus mempersiapkan guru-guru yang memiliki kompetensi khusus tentang berbagai jenis

muatan lokal, c) sekolah harus memberi kesempatan kepada guru-guru untuk mempelajari dan/atau Musyaawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), d) sekolah harus berupaya merintis kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk membantu pelaksanaan dan keberhasilan muatan lokal, e) sekolah harus memiliki dokumen kurikulum dan pembelajaran bermuatan lokal, seperti silabus mata pelajaran muatan lokal, RPP, peta lingkungan, pedoman penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta dokumen muatan lokal lainnya, f) guru harus meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang langkah-langkah pembelajaran bermuatan lokal sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual dan mengacu pada standar proses, dan g) guru sebagai ujung tombak pengembangan kurikulum harus memahami secara komprehensif dan utuh tentang apa, siapa, mengapa, dan bagaimana muatan lokal (Arifin, 2011, hal. 207).

2) Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup Muatan Lokal

Secara khusus, tujuan muatan lokal adalah:

- a) Peserta didik dapat belajar dengan lebih mudah tentang lingkungan dan kebudayaan di daerahnya serta bahan-bahan yang lebih bersifat aplikatif dan terintegrasi dengan kehidupan nyata.
- b) Peserta didik dapat memanfaatkan sumber-sumber belajar setempat untuk kepentingan pembelajaran di sekolah.
- c) Peserta didik lebih mengenal dan akrab dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan budaya yang terdapat di daerahnya masing-masing.
- d) Peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang menunjang pembangunan daerahnya.
- e) Peserta didik dapat mengembangkan materi muatan lokal yang dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi di daerahnya sehingga dapat hidup mandiri, menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

- f) Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya
- g) Peserta didik menjadi termotivasi untuk ikut melestarikan budaya dan lingkungannya serta terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri (Arifin, 2011, hal. 208).

Fungsi muatan lokal adalah:

- a) Fungsi penyesuaian, yaitu mengembangkan program-program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah serta mempersiapkan peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dan akrab dengan lingkungannya.
- b) Fungsi integrasi, yaitu membentuk peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang terintegrasi dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kompetensi sosialnya sesuai dengan karakteristik lingkungannya.
- c) Fungsi perbedaan, yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih materi muatan lokal sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya sebagai pengakuan atas perbedaan individual (Arifin, 2011, hal. 209).

Memperhatikan tujuan dan fungsi muatan lokal, berarti muatan lokal mempunyai kedudukan yang penting dan strategis, yaitu sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam KTSP dan merupakan salah satu komponen KTSP. Selanjutnya, Pusat Kurikulum Balitbang Kemdiknas (2006) mengemukakan ruang lingkup muatan lokal, yaitu:

- 1) Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang berada di daerah tertentu yang berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial-ekonomi, dan lingkungan sosial-budaya. Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut yang sesuai dengan

arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.

2) Lingkup isi/jenis muatan lokal

Lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa asing (Inggris, Mandarin, Arab, dll), kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan (Arifin, 2011, hal. 209-210).

d. Kriteria Pemilihan dan Cara Pengembangan Muatan Lokal

Dalam pengembangan isi muatan lokal, tidak semua yang ada dalam gagasan pokok dari suatu pola kehidupan tertentu dapat dikembangkan menjadi bahan pelajaran bermuatan lokal. Oleh sebab itu, diperlukan kriteria pemilihan bahan atau materi pembelajaran bermuatan lokal, yaitu:

- 1) Sesuai dengan tingkat perkembangan kemampuan fisik, sosial dan mental peserta didik.
- 2) Tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- 3) Tidak bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan, alam, sosial, dan budaya.
- 4) Berguna bagi kehidupan peserta didik dan pembangunan daerahnya.
- 5) Berhitungan dan perimbangan waktu yang diperlukan.

Terdapat dua cara untuk menentukan dan mengembangkan materi pembelajaran bermuatan lokal, yaitu bertitik tolak dari silabus dan bertitik tolak dari pola kehidupan.

- 1) Cara menentukan dan mengembangkan materi pembelajaran bermuatan lokal yang bertitik tolak pada silabus, yaitu a) tentukan pola kehidupan dengan kriteria dekat dengan sekolah, dan merupakan suatu pola kehidupan, b) tentukan gagasan pokok, dengan kriteria timbul dari pengamatan lingkungan sekitar, berkaitan dengan pola kehidupan yang telah ditetapkan, dan mempunyai cakupan informasi yang luas dan dekat dengan anak, c) analisis silabus mata

pelajaran yang relevan, seperti IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Olahraga dan Kesehatan, Kesenian, dan Keterampilan, d) catat pokok bahasan atau sub pokok bahasan atau uraian materi pembelajaran dengan silabus yang mungkin dapat dikaitkan dengan gagasan pokok yang telah ditentukan, e) mengembangkan salah satu pokok bahasan atau subpokok bahasan atau uraian materi pembelajaran yang terpilih dari butir, f) mengembangkan materi pembelajaran bermuatan lokal dari gagasan pokok yang telah ditentukan melalui suatu tabel perincian atau tabel terurai, dan g) menyusun dan mengatur tabel perincian secara lebih sistematis melalui jaringan gagasan pokok.

- 2) Cara menentukan dan mengembangkan materi pembelajaran bermuatan lokal yang bertitik tolak dari pola kehidupan. Dalam melaksanakan cara ini harus ada kerja sama antara guru, pengawas, kepala sekolah, narasumber, dan instansi lain yang terkait dan dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di tingkat Kecamatan. Tujuannya adalah agar informasi yang akan disajikan mempunyai cakupan yang luas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Arifin, 2011, hal. 210-211).

BAB V

ORGANISASI KURIKULUM

A. Pengertian Organisasi Kurikulum

Pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran adalah suatu proses ketika sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan sumber-sumber yang ada dalam sekolah itu sendiri maupun yang berasal dari luardengan usaha secara kolektif. Pengorganisasian kurikulum dan pembelajaran terkait dengan pembuatan sistem untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem tersebut merupakan keseluruhan proses pengelompokan ilmu, materi, pelajaran, pokok pikiran, waktu, media, dan sumber-sumber rujukan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Pengorganisasian dan pembelajaran merupakan proses menyusun organisasi kurikulum dan pembelajaran secara formal dengan aktivitas merancang struktur, menganalisis beban materi pelajaran, menganalisis kualifikasi mata pelajaran, mengelompokkan dan membagi beban materi pelajaran pada tiap-tiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Triwiyanto, 2015, hal. 152).

Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, menentukan

isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan-bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri dari mata pelajaran tertentu yang secara tradisional bertujuan menyampaikan kebudayaan atau sejumlah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus diajarkan kepada anak-anak (Lismina, 2017). Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif (MKDP, 2006, hal. 91).

Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum, seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, yang diorganisasi menjadi satu kesatuan sistem sampai beberapa komponen tersebut menjadi mata pelajaran, program, lesson, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Organisasi kurikulum adalah jawaban atas pertanyaan “Bagaimana pengalaman belajar diorganisasi atau disusun agar efektivitas pendidikan tercapai?” karena pengalaman belajar bersumber dari hasil interaksi antara siswa, konten kurikulum, guru dan lingkungan belajar, pertanyaan itu diparafrasa menjadi “ Bagaimana konten dan kegiatan belajar disusun dalam kurikulum agar tujuan pendidikan tercapai?” (Mohammad Ansyar, 2015, hal. 372).

Berdasarkan pengertian organisasi kurikulum menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi kurikulum adalah salah satu struktur atau rancangan dalam kurikulum yang terdiri dari komponen-komponen kurikulum tersebut, yang setiap organisasi kurikulum memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Implementasi kurikulum dipengaruhi dan bergantung kepada beberapa faktor terutama guru, kepala sekolah, sarana belajar dan orangtua murid. Dalam proses pengembangan kurikulum organisasi berperan sebagai suatu metode untuk menentukan seleksi dan perorganisasian pengalaman-pengalaman belajar yang di selenggarakan oleh sekolah, organisasi kurikulum

menunjukkan peranan guru, peserta didik dan lain-lain yang terlibat aktif dalam proses perencanaan kurikulum. Struktur program dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu struktur horizontal dan vertikal.

Untuk mencapai tujuan pendidikan melalui penyusunan komponen kurikulum seperti konten atau materi, pengetahuan, kegiatan belajar, pengalaman belajar, maupun kompetensi, tidak akan terwujud hanya setelah siswa mengikuti beberapa kali pengajaran atau setelah melakukan beberapa kali kegiatan belajar. Semua susunan komponen kurikulum itu hanya akan efektif melalui proses pembelajaran yang telah berlangsung beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, sampai semuanya terakumulatif menjadi program pendidikan atau kurikulum yang koheran (Mohammad Ansyar, 2015, hal. 372).

B. Dimensi organisasi kurikulum

1. Dimensi Horizontal

Organisasi horizontal mengacu pada keterkaitan dua atau lebih komponen kurikulum, seperti konten dan pembelajara antar dua atau lebih bidang studi pada tingkat pendidikan (kelas) yang paralel. Keterkaitan bisa juga antara konten dan kegiatan belajar pada pembelajaran di sekolah dan pembelajaran di luar sekolah yang memperluas penguasaan (*widening of knowledge*) siswa tentang dua atau lebih bidang studi terkait. Contoh, pembelajaran yang menghubungkan konsep matematika dan fisika di kelas XII SMA, antara sains dan ilmu sosial umum di SD, atau antara pengalaman belajar teori dalam kelas dan pengalaman praktik di lapangan adalah contoh organisasi horizontal. Ada dua prinsip organisasi horizontal yang dipenuhi dalam pengembangan efektivitas pengalaman belajar secara horizontal. Kedua prinsip itu ialah *integration* (integrasi) dan *scope* (ruang lingkup) antar elemen kurikulum atau mata pelajaran seperti teori, konsep, dalil, prinsip dan lain-lain (Mohammad Ansyar, 2015, hal. 372).

a. Kurikulum Interegrasi

Bentuk penintegrasian kurikulum yang biasa dilakukan ialah organisasi mata pelajaran seolah-olah semua mata pelajaran itu terkait satu sama lain; padahal selama mereka bersekolah,

independensi substansi tiap mata pelajaran tetap terpelihara (Ediger, 2011, hal. 3). Dengan peran integrasi kurikulum muncul kritik terhadap kurikulum yang fokus hanya pada pengajaran mata pelajaran tradisional yang terpisah. Desain atau organisasi kurikulum tradisional ini cenderung mengesankan fragmentasi dan keterpisahan pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap (afektif) (Mohammad Ansyar, 2015, hal. 374).

Kekuatan integrasi kurikulum terletak pada pemberian kesempatan belajar kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan nalar ingkat tinggi dan kedalaman analisis, sehingga siswa bisa dilatih membedakan antara fakta dan opini, informasi yang akurat dan yang tidak akurat, serta fantasi dan realita (Ediger, 2011, hal. 4). Selain itu, dalam pemecahan masalah, siswa juga diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas menemukan hal-hal baru, unik dan buah pikiran original, pengembangan berpikir konseptual dan berpikir integratif. Semua kemampuan tersebut memfasilitasi siswa mempelajari berbagai ragam sumber belajar yang relevan dengan pemecahan masalah. Apalagi pemecahan masalah yang mensyaratkan kemampuan berpikir konseptual merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat (Erickson, 2002, hal. 8).

Pendekatan integrasi kurikulum berbeda dengan pendekatan belajar lainnya karena kurikulum integrasi :

- 1) Tidak mementingkan hafalan, tetapi mengutamakan aplikasi pengetahuan untuk memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi,
- 2) Tidak memecahkan mata pelajaran menjadi bagian-bagian, tetapi ditampilkan secara holistik dalam situasi yang dilematis,
- 3) Memakai pendekatan lintas bidang ilmu untuk merumuskan hipotesis dan solusi pemecahannya,
- 4) Menimbang utilitas dan praktikalitas yang inheren dalam menemukan solusi dari masalah yang problematik,
- 5) Fokus pada situasi yang ditemui dalam kehidupan yang mensyaratkan kemampuan aplikasi dari pengetahuan yang telah dipelajari siswa (Ediger, 2011, hal. 4).

b. Ruang Lingkup (*scope*)

Oleh karena ledakan informasi dan pengetahuan yang muncul dan berkembang tiap saat, terutama di abad teknologi digital dan era informasi, dirasa tidak mungkin mengajarkan semua pengetahuan kepada siswa dalam waktu yang terbatas. Betapa banyak, betapa luas dan betapa dalam suatu pengetahuan harus diberikan kurikulum sekolah? Jelas tidak cuup waktu untuk menyajikan semuanya, malahan juga tidak mungkin untuk memberikan sampel dari tiap bidang studi sehingga mustahil pula bisa mengajarkan setiap topik atau konsep secara detail kepada siswa. Karena itu perlu ditetapkan cakupan (*scope*) setiap mata pelajaran sehingga diketahui keluasan dan kedalam tiap konten kurikulum, kegiatan belajar atau pengalaman belajar atau pengalaman belajar yang perlu masuk kurikulum. Kurikulum inti mengacu pada dua jenis pengertian. Pertama, kurikulum yang menyatukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu inti kesatuan yang biasanya menyangkut masalah sosial. Kedua, kurikulum yang memuat sepeeraangkat mata pelajaran yang harus dikuasai siswa sebelum ia melanjutkan untuk mengambil mata pelajaran lain yang bersifat efektif (Mohammad Ansyar, 2015, hal. 377).

2. Organisasi Vertikal

Organisasi vertikal ialah penempatan longitudinal beberapa elrmen mata pelajaran dan konten segingga siswa memahami berkelanjutan dan kedalaman pengetahuannya tentang mata pelajaran itu di kelas atau pada jenjang pendidikan yang berurutan. Misalnya, menghubungkan pembelajaran bahasa Inggris SMP minggu ini dan minggu berikut, atau antara konsep geografi di kelas lima dan di kelas enam SD, adalah contoh organisasi vertikal. Contoh lain ialah ketika kurikulum diorganisasi agar suatu topik atau konsep yang sama dipelajari siswa paa waktu atau tingkat kelas berikutnya.. dengan demikian, melalui susunan vertikal pembelajaran, siswa memperoleh pengetahuan dengan keluasan dan kedalaman yang lebih besar serta lebih (Mohammad Ansyar, 2015, hal. 372).

Adapun dua prinsip organisasi vertikal, yaitu:

a. Urutan (*sequence*)

Prinsip pertama organisasi vertikal adalah urutan (sequence), yaitu meletakkan konten, kegiatan atau pengalaman belajar dalam suatu susunan vertikal yang berkembang secara akumulatif dan berkesinambungan, makin lama makin luas dan makin dalam. Banyak pendidik yang peduli pada pengajaran konten, tetapi cenderung mengabaikan efektivitas urutan konten. Padahal, jika kurikulum mementingkan urutan, siswa akan berhasil dalam pembelajaran, sebab retensi mereka lebih baik jika hubungan antar mata pelajaran atau bidang studi diperhatikan (Ediger, 2011, hal. 43). Sebaliknya, tidak ada perkembangan atau keberlanjutan progresif dari pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman siswa sebelumnya, jika urutan diabaikan. Smith mengemukakan bahwa kurikulum tradisional ialah :

- 1) Dari sederhana ke kompleks
 - 2) Dari yang sudah dikenal ke yang belum dikenal
 - 3) Dari yang konkret ke abstrak
 - 4) Faktor terikat (Dependent Factor) terlebih dahulu
 - 5) Urutan kronologis
 - 6) Urutan berdasarkan kegunaan
- b. Keberlanjutan (continuity)

Dengan prinsip keberlanjutan, penguasaan siswa terhadap mata pelajaran, materi ajar dan pengalaman belajar yang telah dikuasai siswa sebelumnya bisa memperoleh penguatan. Artinya, keberlanjutan membuat pengalaman belajar siswa yang lama dan yang baru terhubung dan terintegrasi, sehingga lama-kelamaan makin bermakna. Keberlanjutan dapat juga menghindarkan replikasi mata pelajaran dan materi ajar yang “jalan di tempat”. Adapun pembelajaran yang tidak berkelanjutan akan mengancam keutuhan pengetahuandan kedalaman penguasaan kompetensi yang akan dicapai. Kedua jenis organisasi ini berkaitan dengan pengaturan konten, kegiatan belajar, atau pengalaman belajar secara berurutan dan berkelanjutan

agar pengalaman belajar siswa pada satu jenjang pendidikan diperdalam dan berkohensi dengan pengalaman belajar yang akan diperoleh siswa pada jenjang pendidikan berikut. (Mohammad Ansyar, 2015, hal. 392).

C. Prosedur Pengorganisasian Kurikulum

Dalam organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yakni ruang lingkup (*scope*), urutan (*sequence*), dan penempatan bahan (*grade placement*):

1. Ruang lingkup bahan, adalah keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari suatu bidang studi mata pelajaran atau dari suatu pokok bahasan tertentu.
2. Urutan bahan, adalah penyusunan bahan pelajaran menurut aturan tertentu secara berurutan, menunjukkan sistematika dan merupakan penyampaian serta penangkapan oleh para siswa.
3. Penempatan bahan, adalah penempatan satu atau beberapa bahan pelajaran untuk kelas tertentu (MKDP, 2006, hal. 92).

D. Jenis-jenis Organisasi Kurikulum

1. Kurikulum Berdasarkan Mata Pelajaran (*Subject Curriculum*)

a. Mata Pelajaran Terpisah (*Separated Subject Curriculum*)

Bentuk kurikulum ini sudah lama digunakan dalam dunia pendidikan kita, karena bentuk kurikulum ini memiliki karakteristik yang sangat sederhana dan mudah dilaksanakan. Tetapi tidak selamanya yang dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial.

Dalam proses pembelajarannya bentuk kurikulum ini cenderung aktivitas siswa tidak diperhatikan bahkan diabaikan, karena yang dianggap penting adalah supaya sejumlah informasi sebagai bahan pelajaran dapat diterima dan dihafal oleh siswa. Demikian pula bahan pelajaran yang dipelajari siswa umumnya tidak aktual karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Secara fungsional bentuk kurikulum ini mempunyai kekurangan

dan kelebihan, kekurangan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah (*separated subject curriculum*) yaitu:

- 1) Bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah, yang menggambarkan tidak ada hubungannya antara materi satu dengan yang lainnya.
- 2) Bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual.
- 3) Proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru sedangkan siswa cenderung pasif.
- 4) Bahan pelajaran tidak berdasarkan pada aspek permasalahan sosial yang dihadapi siswa maupun kebutuhan masyarakat.
- 5) Bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu yang terlepas dengan kejadian masa sekarang dan yang akan datang.
- 6) Proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan bakat, minat dan kebutuhan siswa.

Sedangkan kelebihan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah (*separated subject curriculum*) adalah:

- 1) Bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana dan mudah dipelajari.
- 2) Dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu.
- 3) Kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan.
- 4) Bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada.

Bahan pelajaran yang sifatnya informasi sebagian besar akan diperoleh siswa dari buku pelajaran. Siswa akan lebih banyak menghafal dalam mempelajari pengetahuan yang sifatnya terlepas-lepas, sehingga kemampuan siswa kurang berkembang dan cenderung kurang mengoptimalkan potensi siswa sebagai individu.

b. Mata Pelajaran Gabungan (*Correlated Curriculum*)

Kurikulum bentuk ini pun sudah lama digunakan dalam pendi-

dikan kita. Korelasi kurikulum atau sering disebut broad field pada hakekatnya adalah penyatuan beberapa mata pelajaran yang sejenis, seperti IPA (di dalamnya tergabung ada fisika, biologi dan kimia) dan IPS. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya penggabungan dari mata-mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Korelasi kurikulum merupakan penggabungan dari mata pelajaran yang sejenis secara insidental. Dari bahan kurikulum yang terlepas-lepas diupayakan disatukan dengan bahan kurikulum atau mata pelajaran yang sejenis sehingga dapat memperkaya wawasan siswa dari berbagai disiplin ilmu. Tetapi kenyataan di lapangan atau di sekolah terbukti bahwa guru-guru masih berpegang pada latar belakang pendidikannya. Umpamanya seorang guru sejarah mengajarkan bidang studi IPS, tetapi dalam pelaksanaannya masih mengutamakan pelajaran sejarahnya dari pada substansi IPS itu sendiri. Demikian pula dalam penilaiannya cenderung akan banyak mengukur atau menilai substansi sejarahnya dari pada substansi IPSnya. Salah satu penyebabnya karena guru yang bersangkutan belum memahami prinsip-prinsip pola penggabungan mata pelajaran tersebut. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pola kurikulum ini, kekurangannya adalah:

- 1) Bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam;
- 2) Kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa.
- 3) Kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat dan kebutuhan siswa.
- 4) Apabila prinsip penggabungan belum dipahami kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak.

Sedangkan kelebihan pola mata pelajaran gabungan (*corelated curriculum*) adalah:

- 1) Bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran;
- 2) Memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi;

- 3) Menambah minat siswa berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis.

Bahan pelajaran dalam kurikulum ini memungkinkan substansi pelajarannya memiliki pengertian-pengertian yang lebih mendalam dibanding dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Dalam korelasi kurikulum masih memungkinkan guru akan lebih banyak memberikan substansi prinsip-prinsip dan generalisasi, sehingga guru dapat menyampaikan materi atau membimbing siswa untuk mempelajari pelajaran secara utuh (dalam lingkup *broad field*) dan dapat meningkatkan daya tarik siswa terhadap pelajaran tersebut.

2. Kurikulum Terpadu (*Integrated Curriculum*)

Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam suatu pokok bahasan harus terpadu (*integrated*) secara menyeluruh. Keterpaduan ini dapat dicapai melalui pemusatan pelajaran pada satu masalah tertentu dengan alternatif pemecahan melalui berbagai disiplin ilmu atau mata pelajaran yang diperlukan, sehingga batas-batas antara mata pelajaran dapat diabaikan. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Bahan pelajaran dalam kurikulum ini akan bermanfaat secara fungsional serta dalam pembelajaran akan dapat membentuk kemampuan siswa secara proses maupun produk. Bahan pelajaran selalu aktual sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun siswa sebagai individu yang utuh, sehingga bahan pelajaran yang dipelajari selalu sesuai dengan bakat, minat dan potensi siswa. Dalam penerapan kurikulum ini guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengimplementasikan berbagai strategi belajar mengajar yang sesuai dengan karakteristik kurikulum tersebut.

Pembelajaran yang mungkin banyak digunakan seperti pemecahan masalah, metode proyek, pengajaran unit (*unit teaching*), inkuiri, diskoveri (*discovery*) dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Pengembangan Program pembelajaran perlu dilakukan secara bersama-sama antara siswa

dengan guru, tetapi sebelumnya guru harus menyiapkan ranoangan program pembelajaran sebagai acuan yang perlu kembangkan bersama-sama dengan siswa atau mungkin dengan masyarakat.

Bahan pelajaran yang dipelajari siswa dirumuskan dalam pokok bahasan berupa topik atau pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Proses pembelajaran lebih bersifat fleksibel disesuaikan dengan kemampuan dan pentensi siswa, sehingga tidak mengharapkan hasil belajar yang sama dari semua siswa. Jika dilihat dari prosesnya maka kurikulum ini dalam pengembangannya lebih banyak dipercayakan pada guru, orang tua maupun siswa itu sendiri. Ada beberapa kekurangan maupun kelebihan dalam kurikulum bentuk ini. Kekurangan kurikulum ini di antaranya:

- 1) Ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan.
- 2) Kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis.
- 3) Memerlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok.
- 4) Guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini.
- 5) Masyarakat, orang tua dan siswa belum terbiasa dengan kurikulum ini.

Sedangkan kelebihan dalam kurikulum ini adalah :

- 1) Mempelajari bahan pelajaran melahui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan.
- 2) Memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat dan potensi yang dimilikinyasecara individu.
- 3) Memberikan kesempatan pada siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerjasama (*cooperative*).

- 4) Mempraktekan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran.
- 5) Memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal.
- 6) Memberikan kepada siswa untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung.
- 7) Dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat.
- 8) Dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain.

Adapun kekurangan dalam jenis kurikulum ini adalah:

- 1) Kurikulum dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam pengembangan kurikulum seperti ini.
- 2) Bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis.
- 3) Bahan pelajaran tidak bersifat sederhana.
- 4) Dapat memungkinkan kemampuan yang dicapai siswa akan berbeda secara mencolok.
- 5) Kemungkinan akan memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang banyak oleh karena itu perlu adanya pengorganisasian yang lebih optimal sehingga dapat mengurangi-kekurangan tersebut.

Secara ideal kurikulum ini dapat memberikan kemampuan siswa yang terintegrasi, yang menggambarkan manusia yang harmonis sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun sesuai dengan tuntutan potensi siswa. Kemampuan dalam memecahkan masalah secara ilmiah merupakan bagian dari karakteristik pembelajaran dalam kurikulum ini.

Masalah yang diselesaikan biasanya berkaitan dengan masalah sosial, pekerjaan maupun masalah-masalah yang sifatnya aktual. Sehingga informasi dan kemampuan yang dipelajari siswa akan selalu sesuai dengan perkembangan sosial budaya maupun dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat siswa. Penilaian yang dikembangkan dalam kurikulum ini

cendeng lebih komprehensif dan bersifat terpadu, yaitu penilaian dilakukan secara utuh terhadap kemampuan siswa selama (proses) dan setelah pembelajaran selesai (produk).

a. Kurikulum Inti (*Core Curriculum*)

Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu (*integrated curriculum*). Beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah; 1) kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan (*continue*) selalu berkaitan dan direncanakan secara terus menerus; 2) isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan; 3) isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual; 4) isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial, 5) isi kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa, sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, dan pengalaman yang terpadu.

Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa aspek lingkungan pun menjadi bahan yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum ini. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa core curriculum adalah bagian dari kurikulum terintegrasi atau kurikulum terpadu, sehingga program pembelajaran untuk kurikulum ini harus dikembangkan secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Dalam prosesnya kurikulum terpadu perlu didukung oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu dan kegiatan sehingga aktivitas dan substansi materi yang dipelajari siswa menjadi lebih efektif, efisien dan bermakna. Topik-topik yang dapat diangkat dalam kurikulum ini selalu berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan lingkungan, misalnya topik-topik sebagai berikut:

- 1) Penanggulangan penyebaran virus flu burung (Avian influenza-AI).
- 2) Hakikat demokrasi dalam berbangsa dan bermegara.
- 3) Penanggulangan limbah bagi kehidupan manusia.

- 4) Pentingnya pelestarian sumber alam bagi kehidupan manusia.
- 5) Memahami fungsi atom untuk perdamaian dunia. Kesiapan untuk berumah tangga. Hakikat pornografi dan pornoaksi.
- 6) Membentuk kemampuan berkomunikasi yang efektif.
- 7) Kajian terhadap pola industri dan jasa dalam pertumbuhan ekonomi.

Masih banyak topik lain dalam kurikulum ini yang dapat dibalhas dan diangkat sebagai topik problema dalam pembelajaran, tetapi dalam implementasinya tidak lepas dari prinsip-prinsip inap karakteristik yang telah dikemukakan di atas.

b. *Social Runctions* dan Persistent Situations

Social functions merupakan bagian dari kurikulum terpadu, kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat di antaranya: 1) memelihara dan menjaga keanaman masyarakat 2) perlindungan dan pelestarian hidup, kekayaan dari sumber alam, 3) komunikasi dan transportasi; 4) kegiatan rekreasi; 5) produksi dari distribusi barang dan jasa; 6) ekspresi rasakeindahan; 7) kegiatan pendidikan; 8) integrasi kepribadian; 9) konsumsi benda dan jasa. Dalam *socialfunctions* ini dapat diangkat berbagai kegiatan-kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran. Kegiatan-kegiatan manusia di masyarakat setiap saat akan berubah sesuai dengan perkembangan maupun era globalisasi, sehingga substansi *socialfunctions* pun harus bersifat dinamis.

Sebagai modifikasi dari *social unctions* adalah *persistent life situations*, kajian substansi dalam kurikulum bentuk ini lebih mendalam dan terarah. Dalam *persistent life situations* karakteristiknya adalah situasi yang diangkat senantiasa yang dihadapi manusia dalam hidupnya, masa lalu, Saat ini dan masa yang akan datang. Secara umum ada 3 kelompok situasi yang akan dihadapi manusia, sebagaimana berikut ini:

- 1) Situasi-situasi mengenai perkembangan individu manusia, di antaranya:
 - a) Kesehatan. Manusia perlu memenuhi kebutuhan fisiologis,

emosional, sosial sampai pada pencegahan penyakit.

- b) Intelektual. Manusia memerlukan kemampuan mengemukakan pendapat, memahami pikiran orang lain, berhitung, bekerja yang efektif.
 - c) Moral. Kebebasan individu, tanggung jawab atas diri dan orang lain.
 - d) Keindahan. Mencari sumbernya pada diri sendiri maupun dalam lingkungan.
- 2) Situasi untuk perkembangan partisipasi sosial
- a) Hubungan antar pribadi. Mengusahakan hubungan sosial dan hubungan kerja yang baik dengan orang lain.
 - b) Keanggotaan kelompok. Memasuki lingkungan kelompok, partisipasi, dan kepemimpinan dalam kelompok. Hubungan antar kelompok. Kerjasama dengan kelompok rasional, agama, dan nasional, kelompok sosio-ekonomi.
- 3) Situasi-situasi untuk perkembangan kemampuan menghadapi faktor-faktor ekonomi dan daya- daya lingkungan.
- a) Bersifat alamiah. Gejala fisik tanaman, binatang, serangga, daya fisik dan kimiawi.
 - b) Sumber teknologi. Penggunaan serta pengembangan teknologi.
 - c) Struktur dan daya-daya sosial ekonomi.

c. Experience atau *Activity Curriculum*

Experience curriculum sering disebut juga dengan *activity curriculum*, kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Pada kurikulum ini intinya yaitu siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa. Salah satu karakteristik dari kurikulum ini adalah untuk memberikan pendidikan keterampilan atau kejuruan tetapi di dalamnya tercakup pengembangan kemampuan intelektual dan

akademik yang berkaitan dengan aspek keterampilan atau kejuruan tersebut. Dengan demikian siswa belajar tidak hanya bersifat manual tetapi bersifat reaktif dan problematik sesuai dengan keterampilan yang sedang dipelajarinya. Kurikulum terpadu dipelopori oleh John Dewey yang intinya bahwa pembelajaran harus dimulai dari pembahasan suatu topik lingkungan atau permasalahan diselesaikan secara terpadu dari berbagai disiplin ilmu maupun faktor lingkungan. *Learning by doing dan problem based learning* merupakan konsep John Dewey yang sudah banyak diterapkan di sekolah. Konsep-konsep tersebut umumnya sudah diterapkan pada *activity curriculum*, dalam implementasinya sering juga disebut dengan pembelajaran proyek.

Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam *activity curriculum*” diantaranya:

- 1) *Construction on creative project*. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan idea-idea atau merealisasikan suatu idea dalam suatu bentuk tertentu misalnya; membuat payung, membuat tas dengan mode tertentu, menulis gagasan atau surat, atau menciptakan permainan.
- 2) *Appreciation on enjoyment project*. Pembelajaran ini bertujuan menikmati pengalaman-pengalaman dalam bentuk apresiasi estetis (estetika), misalnya menyaksikan permainan drama, mendengarkan musik, menghayati gambar hasil seni, mendengarkan cerita, atau membaca karangan.
- 3) *The problem project*. Pembelajaran ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang bersifat intelektual tetapi pada substansi yang ada keterampilannya (vokasional), misalnya bagaimana penanganan penyebaran flu burung? permasalahan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat intelektual, tetapi tidak menutup kemungkinan dibahas tentang bagaimana cara membersihkan kandang unggas dengan cara simulasi.
- 4) *The drill or specific project*. Pembelajaran ini bertujuan untuk memperoleh beberapa item atau tingkat keterampilan, misalnya bagaimana mengoperasikan kamera digital, bagaimana cara menulis makalah yang benar, dan sebagainya.

Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh dalam pembelajaran ini, diantaranya:

- 1) Siswa akan berpartisipasi sepenuhnya dalam situasi belajar, karena siswa akan mengalami dan melakukan secara langsung berbagai kegiatan yang telah direncanakan.
- 2) Pembelajaran ini akan menerapkan berbagai prinsip-prinsip belajar yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dalam pembelajaran.
- 3) Mengandung aspek estetika, intelektual, vocational dan kreativitas siswa.

E. Karakteristik Pengorganisasian Kurikulum

Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif, organisasi kurikulum dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang cara pemilihan kurikulum (Wahyudin D. H., 2014, hal. 23). Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, yaitu urutan bahan (*sequence*), komunitas, keseimbangan, dan keterpaduan arahnya berkaitan dengan lingkup (*scope*) (Rusman, 2009, hal. 60).

Ada beberapa bentuk organisasi yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

- a. Kurikulum mata pelajaran; mempunyai ciri-ciri antara lain:
 - 1) terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah satu sama lain, masing-masing berdiri sendiri,
 - 2) tidak berdasarkan pada kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi siswa,
 - 3) bentuk kurikulum yang tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan dalam masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang.
- b. Kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya; 2) sudah dimulai adanya usaha untuk merelevansikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan

sehari-hari, kendatipun tujuannya masih penguasaan pengetahuan; 3) metode penyampaian menggunakan metode korelasi, meski masih banyak menghadapi kesulitan.

- c. Kurikulum bidang studi; memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - 1) kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran, yang di dalamnya terpadu sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama;
 - 2) sistem penyampaian bersifat terpadu;
 - 3) minat, masalah, serta kebutuhan siswa dan masyarakat dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan kurikulum, walaupun masih dalam batas-batas tertentu.
- d. Kurikulum terintegrasi; memiliki ciri-ciri antara lain:
 - 1) berdasarkan psikologi belajar Gestalt atau organismik;
 - 2) berdasarkan kebutuhan, minat dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan siswa;
 - 3) sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit, baik unit pengalaman maupun unit pelajaran;
 - 4) peran guru sama aktifnya dengan peran siswa.
- e. Kurikulum inti; memiliki dua ciri-ciri yakni ciri-ciri pokok dan juga ciri-ciri umum. Masing-masing ciri-ciri tersebut antara lain:
 - 1) ciri-ciri pokok antara lain *core* pelajaran meliputi pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa, *Core Program* berkenaan dengan pendidikan umum untuk memperoleh bermacam-macam hasil (tujuan), berbagai kegiatan dan pengalaman *core* disusun dan diajarkan dalam bentuk kesatuan, tidak dibatasi oleh garis-garis pelajaran yang terpisah;
 - 2) ciri-ciri umum antara lain:
 - (a) perencanaan oleh guru-guru secara kooperatif;
 - (b) pengalaman belajar disusun dalam unit-unit yang luas dan komprehensif berdasarkan tantangan, minat, kebutuhan dan masalah dari kalangan siswa dan masyarakat sekitarnya;
 - (c) guru dan siswa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik sehingga memudahkan memberikan pelayanan terhadap perbedaan individual;
 - (d) pengalaman-pengalaman belajar bersifat fungsional serta melibatkan banyak kegiatan dan bertanggung jawab terhadap para siswa (Wahyudin D. H., 2014, hal. 23-24)

BAB VI

DESAIN PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. Pengertian Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum (*curriculum development*) merupakan suatu istilah yang komprehensif di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan penilaian. Karena pengembangan kurikulum memiliki implikasi terhadap adanya perubahan dan perbaikan. Maka istilah pengembangan kurikulum terkadang juga disamakan dengan istilah perbaikan kurikulum (*curriculum improvement*). Meskipun pada banyak kasus sebenarnya perbaikan itu merupakan akibat dari adanya pengembangan (MKDP, 2006, hal. 83).

Pengembangan kurikulum mempunyai makna yang cukup luas. Menurut (Mukhlisin & Wibowo, 2018), pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Kemudian menurut (Huda, 2019), pengembangan kurikulum merupakan bagian yang esensial dalam proses pendidikan. Pada sisi lainnya berkenaan dengan penjabaran kurikulum (GBPP) yang telah disusun oleh tim pusat menjadi rencana dan persiapan-persiapan mengajar yang telah disusun oleh tim pusat menjadi rencana dan persiapan-persiapan mengajar yang lebih khusus yang dikerjakan oleh guru-guru di sekolah, seperti penyusunan rencana tahunan, caturwulan, satua pelajaran, dan lain-lain. Pengembangan kurikulum itu pada hakikatnya adalah pengembangan komponen-komponen yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri yang terdiri dari 4 komponen utama yaitu tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan

komponen evaluasi(Wahyudin D. H., 2014, hal. 46).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan kurikulum yang esensial dalam proses pendidikan, agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik.

B. Pendekatan Pengembangan Kurikulum

Pendekatan adalah cara kerja yang menerapkan strategi dan metode yang tepat dan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik (Huda, 2019). Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum merujuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dalam bahasa ini bisa mencakup keduanya, tergantung pada konteks pendekatan dan model pengembangan kurikulum itu sendiri. Dilihat dari cakupan pengembangannya ada dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum(Wahyudin D. H., 2014, hal. 47).

1. Pendekatan *Top Down*

Dikatakan pendekatan top down karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para administrator atau dari para pemegang kebijakan (pejabat) pendidikan, seperti dirjen atau para kepala kantor wilayah. Selanjutnya, dengan menggunakan semacam garis komando, pengembangan kurikulum diteruskan ke bawah. Biasanya pendekatan ini banyak dipakai oleh negara-negara yang memiliki sistem pendidikan sentralisasi. Dilihat dari cakupan pengembangannya pendekatan *top down* bisa dilakukan, baik untuk menyusun kurikulum yang benar-benar baru ataupun untuk penyempurnaan kurikulum yang sudah ada.

Prosedur kerja atau proses pengembangan kurikulum model ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dimulai dengan pembentukan tim pengarah oleh pejabat

pendidikan. Anggota tim biasanya terdiri dari pejabat yang ada di bawahnya, seperti para pengawas pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan bisa juga ditambah dengan para tokoh dari dunia kerja. Tugas tim pengarah ini adalah merumuskan konsep dasar, garis-garis besar kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah, dan tujuan umum pendidikan.

- b. Menyusun tim atau kelompok kerja untuk menjabarkan atau rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Anggota kelompok kerja ini adalah para ahli kurikulum, para ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, ditambah dengan guru-guru senior yang dianggap sudah berpengalaman. Tugas pokok ini adalah merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional dari tujuan-tujuan umum, memilih dan menyusun sequence bahan pelajaran, memilih strategi pengajaran dan alat untuk petunjuk evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum bagi guru.
- c. Apabila kurikulum sudah selesai disusun oleh tim atau kelompok kerja, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan-catatan atau direvisi. Jika dianggap perlu, kurikulum itu diujicobakan atau dievaluasi kelayakannya oleh suatu tim yang ditunjuk para administrator. Hasil uji coba itu digunakan sebagai bahan penyempurnaan.
- d. Para administator selanjutnya memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah tersusun itu

Dari langkah-langkah pengembangan seperti yang telah dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa inisiatif penyempurnaan atau perubahan kurikulum dimulai oleh pemegang kebijakan kurikulum, atau para pejabat yang berhubungan dengan pendidikan; sedangkan tugas guru hanya sebagai pelaksana kurikulum yang telah ditentukan oleh pemegang kebijakan(Wahyudin D. H., 2014, hal. 47-48).

2. Pendekatan *Grass Roots*

Pemegang kebijakan kurikulum turun ke staffnya dari atas ke bawah. Jadi, dalam model *grass roots*, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Oleh karena sifatnya yang demikian, pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam penyempurnaan kurikulum.

Dalam kondisi yang bagaimana kira-kira guru dapat berinisiatif memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum dengan pendekatan semacam ini? Minimal ada syarat sebagai kondisi yang memungkinkan, yaitu:

- a. Manakala kurikulum itu benar-benar bersifat lentur sehingga memberikan kesempatan kepada setiap guru secara lebih terbuka untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang sedang diberlakukan. Kurikulum yang bersifat kaku, yang hanya mengandung petunjuk dan persyaratan teknis sangat sulit dilakukannya pengembangannya dengan pendekatan ini.
- b. Hanya mungkin terjadi manakala guru memiliki sikap profesional itu biasanya ditandai dengan kemampuannya yang memadai. Sikap profesional yang tinggi disertai kemampuannya yang memadai. Sikap profesional itu biasanya ditandai dengan keinginan untuk mencoba dan mencoba sesuatu yang baru dalam upaya meringankan kerjanya.

Ada beberapa langkah penyempurnaan kurikulum yang dapat kita lakukan manakala menggunakan pendekatan *grass roots* ini.

- a. Menyadari adanya masalah. Pendekatan *grass roots* biasanya diawali dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Misalnya dirasakan ketidakcocokan penggunaan strategi pembelajaran atau masalah kurangnya motivasi belajar siswa sehingga kita merasa terganggu. Pemahaman dan kesadaran guru akan adanya suatu masalah merupakan kunci dalam *grass roots*. Tanpa adanya kesadaran masalah, tidak mungkin *grass roots* dapat berlangsung.
- b. Mengadakan refleksi. Kalau merasakan adanya masalah maka

selanjutnya kita berusaha mencari penyebab munculnya masalah tersebut refleksi dikaji dengan mengkaji literatur yang relevan dengan masalah yang kita hadapi atau mengkaji sumber informasi lain misalnya melacak sumber-sumber internet atau melakukan diskusi dengan teman sejawat dan mengkaji sumber dari lapangan, misalnya melakukan wawancara dengan siswa, orangtua, atau sumber lain.

- c. Mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Berdasarkan hasil kajian refleksi, selanjutnya guru memetakan berbagai kemungkinan munculnya masalah dan cara penanggulangannya.
- d. Menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.
- e. Mengimplementasi perencanaan dan mengevaluasinya secara terus-menerus sehingga terpecahkan masalah yang dihadapi.
- f. Membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan melalui *grass roots*. Langkah ini sangat penting dilakukan sebagai bahan publikasi sehingga memungkinkan dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh orang lain yang pada gilirannya hasil pengembangan dapat tersebar.
- g. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan(Wahyudin D. H., 2014, hal. 48-49).

Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Para ahli akademis terus mencoba mengembangkan sebuah kurikulum yang akan melengkapi peserta didik untuk masuk ke dunia pengetahuan, dengan konsep dasar dan metode untuk mengamati, hubungan antara sesama, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran/mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik, yang diperlukan untuk persiapan pengembangan disiplin ilmu (Muhaimin, 2010). Sekurang-kurangnya ada tiga pendekatan dalam perkembangan Kurikulum Subyek Akademis,

yaitu(Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum, 2001):

Pendekatan pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta dan bukan sekadar mengingat-ingatnya.

Pendekatan kedua, adalah studi yang bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif-terpadu. Pelajaran tersusun atas satuan-satuan pelajaran, dalam satuan-satuan pelajaran tersebut batas-batas ilmu menjadi hilang. Pengorganisasian tema-tema pengajarandidasarkan atas fenomena-fenomena alam, proses kerja ilmiah dan problem-problem yang ada.

Pendekatan ketiga, adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan mata-mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu kealaman, ilmu sosial, dan lain-lain dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan.

C. Komponen-komponen Pengembangan Kurikulum

Komponen-komponen pengembangan kurikulum dibagi menjadi empat komponen, yaitu:

1. Komponen Tujuan

- a) Tujuan instruksional, adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan meliputi aspek; pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai.
- b) Tujuan kurikuler, adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi dalam kurikulum, mencakup aspek; pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai.
- c) Tujuan instruksional, merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler dan pencapaiannya di bebaskan kepada tiap pokok bahasan.

2. Komponen Isi

Kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan

kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan, agar dengan demikian siswa memperoleh pengalaman belajar.

3. Komponen Metode atau Proses Belajar Mengajar

Yaitu bagaimana cara siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan metode kurikulum berkenaan dengan proses pencapaian tujuan.

4. Komponen pengembangan kurikulum

- a) Tujuan (Objektivitas), yaitu merumuskan tujuannya dengan terumuskannya tujuan kurikulum secara jelas, spesifik, dan operasional.
- b) Pengalaman-pengalaman belajar (*learning experiences*), yaitu pengalaman belajar yang sesuai bagi murid-murid akan lebih mudah karena tujuan yang akan dicapai sudah jelas.
- c) Organisasi dari pengalaman belajar (*organization of learning experience*), yaitu mengorganisasikan pengalaman-pengalaman belajar yang akan berlangsung.
- d) Penilaian hasil belajar (*valuation of student progress*), yaitu menyusun alat-alat evaluasi untuk menilai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai peserta didik (Abdul Majir, 2017, hal. 42-43).

Ada beberapa prinsip pengembangan kurikulum yang harus diketahui, sebelum melakukan pengembangan kurikulum, yaitu:

- a) Prinsip relevansi
- b) Prinsip kontinuitas
- c) Prinsip fleksibilitas
- d) Prinsip khusus
- e) Prinsip efisiensi
- f) Prinsip efektivitas
- g) Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan

D. Hakikat Desain Kurikulum

Desain merupakan proses sistematis dan reflektif dalam menerjemahkan prinsip belajar dan mengajar ke dalam suatu rancangan pembelajaran yang mencakup materi instruksional, kegiatan belajar, sumber-sumber belajar dan sistem evaluasi (Richey, 2011, hal. 2). Desain kurikulum sebagai suatu bagian penting pendidikan, sebab desain kurikulum yang memuat konsep, yang bukan saja berdasarkan teori, tetapi juga prinsip operasional desain, sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Mohammad Ansyar, 2015, hal. 262).

Yang dimaksud desain kurikulum adalah rancangan, pola atau model. Mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan misi visi sekolah. Tugas dan peran seorang desainer kurikulum sama seperti seorang arsitek. Sebelum menentukan bahan dan cara mengkonstruksi bangunan terlebih dahulu seorang arsitek harus merancang model bangun yang akan dibangun. Berdasarkan pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Desain kurikulum ini adalah suatu proses yang dilakukan dimana sebelum kurikulum itu menjadi satu kesatuan yang utuh, sebelum itu perlu adanya desain, rancangan, pola bagaimana kurikulum itu dirancang sesuai dengan visi misi dan tujuan kurikulum tersebut.

E. Desain Pengembangan Kurikulum Berbasis Karakter

Pendidikan karakter menjadi salah satu solusi alternatif pemecahan masalah pendidikan pada setiap jenjang. Ditinjau dari sisi filosofis, kurikulum berbasis karakter, sesungguhnya, merupakan suatu desain kurikulum yang menyiapkan warga masyarakat yang menghargai nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Lulusan suatu jenjang pendidikan diharapkan tidak terasing dengan lingkungannya. Sedangkan ditinjau dari sisi psikologis, kurikulum berbasis karakter mengutamakan pengembangan potensi peserta didik yang manusiawi (Abdul Majir, 2017, hal. 64).

Abdul Majir(2017:hal 64) menyatakan bahwa secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar:

1. Kedamaian (*peace*)
2. Menghargai (*respect*)
3. Kebahagiaan (*happinnes*)
4. Kejujuran (*honesty*)
5. Kerendahan hati (*humulity*)
6. Kasih sayang (*love*)
7. Tanggung jawab (*responsibility*)
8. Kesederhanaan (*simplicity*)
9. Toleransi (*tolerance*)
10. Persatuan (*unity*)

Abdul Majir (2017: hal 65) menyatakan bahwa dengan batasan yang demikian, para kepala sekolah atau pihak-pihak penyelenggara pendidikan perlu memperhatikan dan mengetahui makna karakter dan karakter setiap individu. Nilai-nilai karakter yang perlu diajarkan di sekolah, baik secara individual maupun kolektif sebagai berikut:

1. Nilai-nilai spiritualitas
2. Nilai-nilai solidaritas
3. Nilai-nilai kedisiplinan
4. Nilai-nilai kemandirian
5. Nilai-nilai kemajuan dan keunggulan

Dalam konteks implementasi kurikulum sekolah, sesungguhnya nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan menjadi isi atau muatan kurikulum, untuk memperkaya kajian materi pembelajaran pokok. Tahapan desain pengembangan kurikulum berbasis karakter adalah sebagai berikut (Sanjaya, 2008, hal. 81-82) :

1. Perencanaan

Kegiatan pokok yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah merancang dan mengembangkan silabus yang merupakan panduan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Disini, yang perlu dijabarkan dan dikembangkan adalah aspek-aspek yang tercakup di dalam silabus yang akan direalisasikan dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Prinsip-

prinsip yang dipakai untuk mengembangkan silabus sama dengan pengembangan kurikulum pada umumnya. Beberapa prinsip umum yang dipakai dalam pengembangan silabus, antara lain; relevansi, fleksibel, kontinuitas, praktis dan efektivitas.

Selanjutnya, apabila disepakati bahwa silabus merupakan salah satu produk kurikulum sebagai pedoman tertulis, tentu membawa konsekuensi terhadap aspek-aspek yang dikembangkan. Artinya, aspek-aspek yang ada dalam silabus haruslah merupakan aspek-aspek yang terdapat dalam kurikulum. Beberapa aspek pokok yang perlu ada dalam silabus kurikulum berbasis karakter, adalah rumusan kompetensi, hasil belajar, indikator keberhasilan, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, evaluasi, alokasi waktu, dan sumber bahan.

2. Implementasi

Implementasi kurikulum berbasis karakter merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum (dalam arti rencana tertulis) kedalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Beberapa istilah yang bisa disepadankan dengan istilah implementasi kurikulum adalah pembelajaran atau pengajaran atau proses belajar mengajar.

Implementasi kurikulum memiliki posisi yang sangat menentukan bagi keberhasilan kurikulum sebagai rencana tertulis. Bisa jadi, dua orang guru/dosen yang sama-sama mengimplementasikan sebuah kurikulum (misal, kurikulum mata kuliah sosiologi pendidikan) akan diterima atau dikuasai anak secara berbeda bukan karena isi atau aspek-aspek kurikulumnya yang berbeda, tetapi lebih disebabkan perbedaan dalam implementasi kurikulum yang diupayakan guru/dosen. Disini, diperlukan adanya berbagai modifikasi atas berbagai komponen kurikulum, dengan pola pengembangannya bersifat *integrated*.

3. Evaluasi

Desain kurikulum yang berlaku di suatu lembaga pendidikan sangat mempengaruhi terhadap sistem evaluasinya. Sebab evaluasi merupakan salah satu komponen pokok kurikulum. Dengan demikian, jika pihak sekolah menerapkan kurikulum berbasis karakter maka sistem evaluasinya pun akan berubah menyesuaikan dengan desain kurikulumnya. Evaluasi kurikulum berbasis karakter bertujuan untuk mengetahui tentang kelayakan (*feasibility*) kurikulum berbasis karakter, baik dalam bentuk rancangan, implementasi, maupun hasil.

Hasil evaluasi digunakan untuk menetapkan nilai dan arti terhadap kurikulum berbasis karakter yang sedang berjalan. Sasaran evaluasi sesuai dengan tujuannya meliputi: evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan hasil belajar. Pendekatan evaluasi yang digunakan bisa dalam bentuk pendekatan kuantitatif atau kualitatif. Sehingga sifat evaluasi formatif maupun sumatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyyah, et all. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah: Optimalisasi Mutu Pendidikan melalui Pengembangan Kurikulum dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Arifin, Zainal. (2011). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Beauchamp, G. A. (1975). *Curriculum Theory*. Willmette Illionis: The Kagg Press.
- Chintya, H. A. (2011). *Pengertian, Dimensi, Fungsi, dan peranan Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dr. Abdul Majir, M. (2017). *DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbit CV BUDI UTAMA).
- Ediger, M. &. (2011). *Curriculum Organisation*. New Delhi: Discovery Publishing House.
- Engkoswara dan A. Komariah. (2010). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Al-fabeta.
- Erickson, H. L. (2002). *Concept-Based Curriculum and Instruction*. Thousand Oaks, California: Corwin Press, Inc.
- George, T. (1986). *Asas-asas Manajemen XE “Manajemen”*. Terjemahan Winardi. Bandung: Alumni.
- Hamali, A.Y. (2019). *Pemahaman Administrasi, Organisasi, dan Manajemen XE “Manajemen”*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

- Hamalik, O. (2007). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Harsey, B. a. (1988). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Hernawan, A.H. dan R. Cynthia. (2011). *Pengertian, Dimensi, Fungsi, dan Peranan Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2019). Pendekatan-pendekatan Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Pendidikan Islam*, 175.
- Johnson, D. P. (1981). *Sociological Theory: Classical Founders and Contemporary Perspective*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Lestari, T. (2006). Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. *PENGANTAR PENGEMBANG SILABUS Bimtek KTSP*.
- Lie, A. (2013). “Kurikulum sebagai Kendaraan”. Dalam Samsul Muarif (ed.). *Kurikulum 2013 Tanya Jawab dan Opini*. Jakarta: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lismina. (2017). *Pengembangan Kurikulum*. ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mc. Ashan, M. W. (1981). *Competency Based Education and Behavioral Objective*. Englewood Cliffs. Education Technological Publication Inc. New Jersey.
- McNeil, John D. (1977). *Criculum: A Comprehensive Introduction*. Boston, Little and Company.
- MKDP, T. P. (2006). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: UPI PRESS.
- Muhaimin. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Kristiawan, D. S. (2017). *Manajemen XE “Manajemen” Pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Mukhlisin, A., & Wibowo, R. (2018). Desain Pengembangan Kurikulum Integratif dan Implementasi dalam Pembelajaran. *Jurnal Tawadhu*, 365.
- Nasution, S. (2012). *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ornstein, A. C. (1998). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Prof. Mohammad Ansyar, P. (2015). *KURIKULUM Hakikat, Fondaso, Desain dan Pengembangan*. Jakarta: KENCANA Divisi dari KENCANAMEDIA Group.
- Ramayulis. (2005). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Richey, R. C. (2011). *The Instructional Design Knowledge Base : Base Theory, Reseach, and Practice*. New York: Routledge.
- Rosnita, M. (2011). *Kurikulum Pendidikan Islam*. Banda Aceh: PENA.
- Rusman. (2009). *Manajemen XE “Manajemen” Kurikulum*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanjaya, W. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sanjaya, Wina dan D. Andayani. (2011). “Komponen-komponen Pengembangan Kurikulum”. *Dalam Tim Pengembangan MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarinah, S. A. (2015). *Pengantar Kurikulum*. Yogyakarta: Deepublish grup penerbit CV BUDI UTAMA.
- Schubert, W. H. (1986). *Curriculum: Perspektif, Paradigm, and Possibility*. New York: McMillan Publishing Company.
- Siagian, S. P. (1997). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siswanto, H. (2007). *Pengantar Manajemen XE “Manajemen”*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Smith, B. S. (1957). *Fundamentals of Curriculum Development*. New York: Harcourt Brace and World.

- Soetopo, H. (2009). *Manajemen XE “Manajemen” berbasis sekolah & kurikulum XE “kurikulum” berbasis kompetensi (Bunga Rampai Pokok Pikiran Pembaharuan Pendidikan di Indonesia)*. Malang: Falkutas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Sukmadinata, N. S. (2001). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, N. S. (2004). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2001). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suprihanto, J. (2014). *MANAJEMEN*. Yogyakarta: GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS.
- Suranto, D. S. (2009). *Konsep Pengembangan Kurikulum Membangun Sekolah Global*. Semarang: ALPRIN.
- Taba, H. (1962). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt Brace Jovanovitch, Inc.
- Tanner, D. &. (1975). *Criculum Development: Theory into Practice*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Triwiyanto, T. (2015). *Manajemen XE “Manajemen” Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahyudin, D. H. (2014). *MANAJEMEN KURIKULUM*. Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.
- Zais, R. (1976). *Curriculum, Principles and Foundation*. New York: Haeper and Row Publisher.

GLOSARIUM

Management	Suatu proses dimana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok.
Curriculum	Perangkat yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran yang akan diberikan kepada pendidikan.
Komperhensif	Segala sesuatu yang sifatnya luas dan lengkap yang meliputi berbagai aspek atau ruang lingkup yang luas.
Kooperatif	Bersifat bekerja sama dan bersedia membantu
Sistematik	Susunan atau aturan
Demokratisasi	Transisi ke razim politik yang lebih demokratis.
Efektivitas	Tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai karena adanya proses kegiatan.
Efisiensi	Kemampuan untuk menghindari pemborosan materia, tenaga, uang, dan waktu dalam melakukan sesuatu atau dalam menghasilkan hasil yang diinginkan.
Konteks	Kondisi di mana suatu keadaan terjadi.
Filosofis	Kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa.
RPP	Rencana pelaksanaan pembelajaran.

Input	Memasukan, alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program yang akan di proses di dalam komputer.
Design	Proses untuk membuat dan menciptakan objek baru.
Cost benefit	Teknik sederhana yang banyak digunakan untuk mengambil keputusan mengenai perubahan.
Konservatif	Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku.
Perspektif	Sudut pandang, Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.
Kritis	Gawat, genting, dalam keadaan yang paling menentukan berhasil atauagalnya suatu usaha.
Komponen	Bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan.
Metode	Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudah pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
Strategi	Sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan. Aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar.
Radikal	Secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip), amat keras menuntut perubahan, maju dalam berpikir atau bertindak.
Logis	Sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, masuk akal.
Profesional	Bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Motivasi	Dorongan yang timbul dari diri seseorang secara tidak sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.
Relevansi	Hubungan atau kaitan.
Ekstra	Tambahan di luar yang resmi, sangat, luar biasa.
Equity	Bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, besarnya hak atau kepentingan pemilik atau entitas pada harta suatu perusahaan.
Ulet	Liat, kuat, tidak mudah putus asa yang disertai kemauan keras dalam berusaha mencapai tujuan dan cita-cita.
Energik	Penuh energi atau bersemangat.
Studi	Penelitian ilmiah, kajian, atau telaahan.
Seleksi	Pemilihan, metode dan prosedur yang dipakai oleh bagian personalia.
Fasilitas	Sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, atau kemudahan.
Optimal	Baik, tinggi, dan paling menguntungkan.
Dinamis	Penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan da sebagainya, mengandung dinamika.
Ekstrakurikuler	Berada di luar program yang tertulis di dalam kurikulum, seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa.
Kokurikuler	Rangkaian kegiatan kesiswaan yang berlangsung di sekolah.

Barometer	Alat untuk mengukur tekanan udara, dipakai untuk meramalkan keadaan cuaca dan mengetahui ketinggian suatu tempat dari permukaan lau, tolok ukur, ukuran.
Key factor	Faktor utama, kunci, petunjuk, dan pedoman.
Supervisor	Pengawas utama, pengontrol utama, penyedia.
Horizontal	Memiliki makna terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan horizon atau garis datar; mendatar. Sehingga pengertian dari garis horizontal adalah garis mendatar.
Vertikal	Garis dengan posisi tegak lurus terhadap permukaan bumi.
Holistik	Salah satu pola gayaberpikirnya orang-orang yang bergelut di dunia psikolog.
Korelasi	Disebut koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua perubahan acak (random variable).
Implementor	Orang yang bertanggung jawab dalam mengimplementasi sebuah sistem.
Hipotesis	Jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.
Implementasi	Penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.
Modul	Bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yyang mencangkup isi maateri, metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
Harfiah	Arti kata sebagaimana aslinya atau asalnya.
Kontemporer	Kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini.

Humanistik	Salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia.
Intensif	Secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal.
Indikator	Nilai dari variabel yang kita ingin coba teliti. Hal ini juga dapat diartikan sebagai sebuah ciri, karakteristik, atau ukuran yang menunjukkan perubahan pada fenomena tersebut.
Implikasi	Suatu efek atau akibat yang di dapatkan ketika obyek di berikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja dan dapak ini akan dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu.

INDEKS

A

Administrasi 1, 12, 13
Ahli 1, 2, 3, 4, 5, 9, 18, 20, 23,
24, 29, 40, 68, 87, 89, 92
Akademik 12, 24, 27, 29, 39, 40,
48, 54, 81
Aktif, 14, 40
Alokasi 41, 47, 50, 52, 55, 56,
59, 94
Aset 1

B

Bangsa 9, 11, 20, 26, 37, 105
Barometer 12
Berorientasi 10, 22, 35, 45
Budaya 3, 10, 17, 22, 25, 45, 48,
54, 59, 61, 62, 63, 64, 74,
78, 92

D

Dana 45
Demokratisasi 6
Dokumen 2, 62

E

Efektif 2, 11, 12, 14, 15, 25, 29,

38, 39, 40, 45, 46, 59, 61,
68, 69, 71, 79, 80, 81, 83

Efisien 2, 12, 15
Estetika 20, 38, 50, 53, 82, 83
Etika 20, 38
Evaluatif 10

F

Filosofis 3, 6, 10, 19, 31, 92
Filsafat 18, 19, 20
Fleksibel 52, 55, 77, 94
Formal 21, 24, 32, 33, 38, 48,
54, 67

G

Guru 13, 27, 33, 41, 46, 61, 77,
104, 105

I

Ideal 20, 53, 78
Implementasi 7, 13, 15, 31, 39,
68, 93, 94, 95
Implikasi 2, 40, 85
Indikator 25, 47, 53, 55, 57, 58,
59, 94
Individu 20, 21, 23, 27, 35, 74,

76, 77, 80, 81, 93
Informal 21, 24, 25, 49
Instansi 14
Intrakulikuler 15

K

Komperhensif 4
Konkret 20, 58, 72
Kooperatif, 4, 5, 38
Kooperatif, 6
Kreatif 9, 10, 11, 40, 47
Kritis 9, 10, 28, 33
Kurikulum 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 41, 44,
47, 48, 50, 52, 56, 59, 60,
61, 62, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 105, 106

L

Lembaga pendidikan 3, 4
Logika 18, 19, 38
Logis 2, 12, 18, 19, 46, 74, 77,
78

M

Manajemen xi, 1, 4, 5, 14, 17,
45, 46
Masyarakat 9, 10, 11, 13, 15, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
28, 29, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 40, 42, 45, 46, 54,
55, 59, 63, 73, 74, 76, 77,
78, 80, 83, 84, 90, 92

Mata pelajaran 2, 41, 43, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 62,
67, 69, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 83

Modern 2, 3, 23, 30
Mutu 13, 14, 45, 46
Mutu pendidikan 46

N

Nonformal 48, 54

O

Observasi 59
Organisasi 1, 30, 32, 33, 35, 67,
68, 69, 71, 72, 83, 89

P

Pegawas 13
Pelajaran 2, 3, 9, 33, 36, 37, 39,
41, 42, 43, 44, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
58, 59, 60, 61, 64, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 83, 84, 85,
87, 89, 90
Pendidikan 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10,
11, 12, 13, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 27, 31,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 58, 59, 60, 61, 67, 68,
69, 71, 73, 75, 80, 81, 84,
85, 86, 87, 89, 91, 92, 93,
94, 104, 105
Pengajaran 2, 10, 67, 69, 70, 72,
76, 84, 87, 90, 94
Pengawas 13, 31, 65, 87
Pengelolaan 1

Pengembangan kurikulum 4,
5, 6, 13, 19, 20, 21, 30, 31,
32, 33, 34, 62, 67, 68, 85,
86, 88, 91, 93

Pengetahuan 1, 3, 13, 14, 18, 19,
21, 22, 25, 26, 28, 29, 37,
38, 41, 48, 49, 50, 53, 57,
62, 64, 68, 69, 70, 71, 72,
74, 78, 84, 89, 90, 105

Perspektif 1, 9, 11

Peserta didik 3, 6, 10, 11, 12, 15,
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,
29, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 42, 43, 44, 46, 47, 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 57,
58, 59, 61, 63, 64, 67, 69,
89, 91, 92, 94

Produktif 23

Prokduktivitas 6

Proses 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13,
15, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 28, 30, 33, 35, 36,
37, 43, 44, 46, 48, 57, 58,
62, 67, 68, 69, 70, 73, 76,
79, 85, 86, 90, 91, 92, 94

Psikologi, 20, 21

Psikologis 3, 10, 21, 92

R

Rancangan 2, 7, 9, 10, 68, 92,
95

Relevan 11, 13, 15, 40, 42, 64,
70, 89

Rencana 3, 4, 7, 11, 29, 31, 32,
36, 46, 55, 61, 85, 86, 94

Rpp 7, 62

S

Sarana pembelajaran 7

Silabus 7, 37, 40, 47, 55, 56

Siswa 10, 11, 14, 15, 17, 22, 31,
56, 58, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
81, 83, 84, 88, 89, 91

Sosial 3, 10, 12, 17, 19, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 35, 38, 43,
48, 51, 54, 55, 57, 59, 61,
62, 63, 64, 69, 71, 73, 74,
78, 79, 81, 90

Sosial budaya 11

Subsistem 22, 23

T

Tujuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 15, 20, 22, 23, 24, 27,
28, 31, 32, 33, 34, 36, 39,
41, 44, 46, 47, 49, 61, 62,
63, 67, 68, 69, 83, 84, 85,
87, 90, 91, 92, 105

U

Usaha 13, 22, 41, 44, 48, 67, 83

V

Visi 4, 6, 7, 9, 10, 12, 92

Y

Yogyakarta iv

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Rusi Rusmiati Aliyyah, M.Pd adalah dosen tetap program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor. Pernah menjabat Kepala Pusat Sumber Belajar FKIP UNIDA (2016), Wakil Dekan Bid Adm, Keuangan dan SDM (2014-2016), Ketua Program Studi PGSD FKIP UNIDA (2013-2014), Kepala TK Teladan Amaliah Bogor (2009-2013), Wakil Kepala Bid Humas SMA Islam Terpadu Mahmudiyah Sukabumi (2007-2009), Wakil Kepala MTs Antariksa Sukabumi (2006-2007), menjadi sekretaris pada Yayasan Pendidikan Islam Mahmudiyah Sukabumi (2015-sekarang) dan anggota senat Universitas Djuanda Bogor (2018-2022).

Saat ini menjadi asesor pada BAN PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat (2018-2023), asesor pada BAN S/M Provinsi Jawa Barat (2019-2024), dan Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2019-2024). Tim Inti Fasilitator Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Rencana Kerja Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik (e-RKAM) Kementerian Agama Republik Indonesia (2020-2014). Reviewer pada *International Journal of Instruction* (2020-sekarang), *Universal Journal of Educational Research* (2020-sekarang), *International Journal on Research in STEM Education* (2020-sekarang), *International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities* (2020-sekarang), *Education Journal SciencePG Science Publishing Group* (2020-sekarang), *Jurnal Aksara PPs Universitas Negeri Gorontalo* (2020-sekarang), *Journal RSF PRESS* (2020-sekarang), *Journal of Administration and Educational*

Management (ALIGNMENT) (2019- sekarang), Jurnal Sekolah Dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang (2019-sekarang), Ta'dibuna Jurnal Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor (2019-sekarang).

Pernah mendapatkan hibah penelitian dari DRPM Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan KEMENRISTEKDIKTI pada skim PTUPT dengan judul Model Pengembangan Program Pendampingan Guru Berprestasi (2019-2021), KKN-PPM dengan judul Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Tepat Guna Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Desa Sukakarya Kabupaten Bogor Jawa Barat (2018), PDP dengan judul Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten dan Kota Bogor (2017), PTUPT dengan judul Model Pembelajaran Berbasis Blended Learning dalam Meningkatkan Karakter Kemandirian di Perguruan Tinggi (2016), dan PDP dengan judul Pengelolaan Kelas Rendah pada Sekolah Dasar Amaliah Ciawi Bogor (2016).

Buku yang sudah ditulis adalah: Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah FKIP UNIDA (2014), Pengantar Ilmu Pendidikan (2017), Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2018), dan Manajemen Lembaga Pendidikan (2019), Manajemen Pendidikan (2019), Membangun Pendidikan Menuju JABAR Juara (2019), Menggapai Cita Melalui Bidikmisi (2020), Evaluation Model of Education Programs (2020), Manajemen Berbasis Sekolah: Optimalisasi Mutu Pendidikan melalui Pengembangan Kurikulum dan Partisipasi Masyarakat (2020).



Adelia Wulandari lahir di Bogor, 14 Maret 1999, anak tunggal, penulis adalah seorang mahasiswa. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh, Taman Kanak-kanak TK Kemala Bhayangkari 55 lulus tahun (2005), Sekolah Dasar di SDN CIMANDALA 03 lulus tahun (2011), Sekolah Menengah Pertama di SMP NEGERI 15 BOGOR lulus tahun (2014), Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI 4 CIBINONG lulus tahun (2017). Saat ini

penulis sedang menempuh studi S1 di UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR (UNIDA), penulis memilih untuk belajar menempuh pendidikan keguruan dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada program studi yang dipilihnya karena minat dan cita-citanya untuk menjadi seorang guru, maka penulis masuk dalam prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di UNIDA. Selain berkuliah, penulis juga aktif dalam Organisasi. Penulis kini menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan PGSD periode 2020–2021, selain itu penulis juga aktif sebagai relawan DUTA TUNANETRA. Harapan penulis adalah ingin menjadi guru yang teladan, bertanggung jawab, amanah, dan ikhlas dalam mendidik dan bermanfaat bagi orang lain serta membahagiakan kedua orangtua. Buku ini adalah buku pertama yang telah ditulisnya. Dengan harapan penulis, semoga buku MANAJEMEN KURIKULUM ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya terutama dalam dunia pendidikan mengenai kemajuan dan perkembangan pendidikan bangsa agar terciptanya tujuan pendidikan nasional yang baik dan berkualitas salah satunya pada kurikulum peendidikannya.



Silvi Ayu Cahyani lahir di Bogor, 15 Juni 2001, anak pertama dari dua bersaudara, ia adalah seorang mahasiswa. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuh, Taman kanak-kanak TK AZ-ZAHRA lulus tahun (2007), Sekolah dasar di SDN KOPO 01 lulus tahun (2013), Sekolah menengah pertama di SMP

NEGERI 1 CISARUA lulus tahun (2016), Sekolah menengah atas di SMA NEGERI 1 CISARUA lulus tahun (2019). Sedang menempuh studi S1 di salah satu universitas di kota kelahirannya tepatnya di UNIVERSITAS DJUANDA (UNIDA) Bogor, pada saat ini penulis memilih untuk belajar menempuh pendidikan keguruan dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada program studi yang dipilihnya karena minat dan cita-citanya untuk menjadi seorang guru, maka penulis masuk dalam prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di UNIDA. Dengan harapannya dapat menjadi guru

yang teladan, bertanggung jawab, amanah, dan ikhlas dalam mendidik dan bermanfaat bagi orang lain serta membahagiakan kedua orangtua saya. Buku ini adalah buku pertama yang telah ditulisnya. Dengan harapan penulis, semoga buku MANAJEMEN KURIKULUM ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya terutama dalam dunia pendidikan mengenai kemajuan dan perkembangan pendidikan bangsa agar terciptanya tujuan pendidikan nasional yang baik dan berkualitas salah satunya pada kurikulum peendidikannya.

Manajemen Kurikulum adalah pengaturan yang tersistematis mengenai pengelolaan kurikulum untuk mencapai tujuan kurikulum. Dalam menjalankan manajemen kurikulum diperlukan keterlibatan masyarakat dengan maksud agar mampu membantu implementasi kurikulum, karena sekolah harus mampu mandiri dalam menyiasati kebutuhan kurikulum, mengatur, mengendalikan, dan melaporkan hasil telaah kurikulum kepada berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat.

Manajemen Kurikulum bertujuan untuk mengefektifkan kegiatan di sekolah juga sebagai parameter untuk mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran.

Buku ini disusun dalam rangka memberikan pemahaman kepada guru, kepala sekolah, pengawas, pengelola lembaga pendidikan, mahasiswa, dosen, dan pemerhati pendidikan sehingga sangat cocok untuk dijadikan bahan referensi pemikiran tentang pengelolaan kurikulum pada satuan pendidikan.